



BAB I

PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, disusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 yang berupa Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan untuk disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan laporan keuangan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode laporan. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL) menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya terhadap pos-pos saldo anggaran lebih awal, penggunaan saldo anggaran lebih, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, dan lain-lain serta saldo anggaran lebih akhir.

Laporan Operasional (LO) merupakan laporan keuangan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya dalam satu periode pelaporan.

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) yaitu laporan keuangan yang menunjukkan perubahan ekuitas satu periode.

Neraca merupakan laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Kota Salatiga mengenai Aset, Kewajiban dan Ekuitas pada tanggal tertentu.

Sedangkan Laporan Arus Kas (LAK) adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional, aktivitas investasi aset non keuangan, aktivitas pembiayaan, dan aktivitas transaksi non anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas pada periode tertentu.

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) merupakan penjelasan naratif atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca dan Laporan Arus Kas (LAK). Catatan atas Laporan Keuangan juga menyajikan informasi tentang Kebijakan Akuntansi yang digunakan oleh Pemerintah Kota Salatiga sebagai dasar penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024. Catatan atas Laporan Keuangan merupakan

Bab I - 1



bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2024. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pemakai informasi laporan keuangan secara luas tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan Pemerintah Kota Salatiga secara keseluruhan.

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2024 disusun guna menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Salatiga selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Tujuan penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2024 adalah untuk menyajikan informasi mengenai:

- a. Kemampuan Pemerintah Kota Salatiga dalam merealisasikan pendapatan yang dianggarkan;
- b. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kota Salatiga berdasarkan anggaran belanja yang telah ditetapkan;
- c. Sumber-sumber pembiayaan dalam rangka menutup defisit dan pemanfaatan surplus anggaran;
- d. Semua aset dan sumber daya ekonomis yang dikuasai atau dimiliki oleh Pemerintah Kota Salatiga;

Kewajiban-kewajiban Pemerintah Kota Salatiga kepada pihak ketiga yang belum dibayar atau diselesaikan sampai dengan tanggal neraca;

- a. Kekayaan bersih (Ekuitas Dana) yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Salatiga pada tanggal neraca;
- b. Sumber-sumber penerimaan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi;
- c. Penggunaan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi; dan
- d. Saldo kas dan setara kas pada awal dan akhir periode akuntansi.



1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kota Salatiga disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai keuangan daerah serta perencanaan pembangunan daerah, terdiri atas:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024;
6. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Kota Salatiga, Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Sidorejo, Perseroan Terbatas Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah dan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan daerah Jawa Tengah;
7. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2021;
8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga;
10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 18 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;



11. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
13. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
14. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Persediaan;
15. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 41 Tahun 2018 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang Mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 40 Tahun 2020;
16. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi Nomor 16 Tentang Badan Layanan Umum Daerah;
17. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 90 Tahun 2020 tentang Sistem Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah;
18. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Salatiga;
19. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Nomor 1 Tentang Penyajian Laporan Keuangan;
20. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Nomor 2 Tentang Laporan Realisasi Anggaran;
21. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 60 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Nomor 3 Tentang Neraca;
22. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Nomor 4 Tentang Laporan Arus Kas;
23. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Nomor 5 Tentang Catatan Atas Laporan Keuangan;
24. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Nomor 6 Tentang Akuntansi pendapatan;
25. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Nomor 7 Tentang Belanja dan Beban;



26. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 65 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Nomor 8 Tentang Akuntansi Pembiayaan;
27. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Nomor 9 Tentang Akuntansi Aset;
28. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Nomor 10 Tentang Akuntansi Kewajiban;
29. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Nomor 11 Tentang Akuntansi Ekuitas;
30. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Nomor 12 Tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan;
31. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Nomor 13 Tentang Laporan Keuangan Konsolidasi;
32. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Nomor 14 Tentang Laporan Operasional;
33. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Nomor 15 Tentang Laporan Perubahan Saldo Anggaran lebih (LPSAL);
34. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Nomor 17 Tentang Perjanjian Jasa Konsesi-Pemberi Konsesi;
35. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 74 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Nomor 18 Tentang Akuntansi Properti Investasi;
36. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Nomor 19 Tentang Peristiwa Setelah Tanggal Neraca;
37. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 76 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Anggaran;
38. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 77 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Pendapatan;
39. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 78 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Beban dan Belanja;
40. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 79 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Transfer;
41. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 80 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Pembiayaan;



42. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 81 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Kas dan Setara Kas;
43. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 82 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Piutang;
44. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 83 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Persediaan;
45. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 84 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Investasi;
46. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 85 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Aset Tetap;
47. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 86 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Penyusutan Aset Tetap dan Amortisasi Aset Tidak Berwujud;
48. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 87 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Dana Cadangan;
49. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 88 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Aset Lainnya;
50. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 89 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Kewajiban;
51. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 90 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Koreksi Kesalahan;
52. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 91 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Konsolidasian;
53. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 92 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Konsesi Jasa; dan
54. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 93 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Properti Investasi.
55. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
56. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2023 tentang Bagan Akun Standar (BAS);
57. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2024;
58. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 33 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;



59. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
60. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 39 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
61. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 45 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 47 Tahun 2024.

1.3 Sistematika Penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan

Sistematika isi Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga adalah sebagai berikut :

1. Pernyataan Tanggung Jawab
2. Laporan Realisasi Anggaran
3. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (BLUD)
4. Neraca
5. Laporan Operasional
6. Laporan Perubahan Ekuitas
7. Laporan Arus Kas (BLUD)
8. Catatan Atas Laporan Keuangan

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Sistematika Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

- 2.1 Ekonomi Makro
- 2.2 Kebijakan Keuangan
 - 2.2.1 Kebijakan Anggaran Pendapatan
 - 2.2.2 Kebijakan Anggaran Belanja
 - 2.2.3 Kebijakan Anggaran Pembiayaan
- 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD



Bab III Ikhtisar Capaian target Kinerja Keuangan

- 3.1 Pengelolaan Pendapatan Daerah
 - 3.1.1 Target dan Realisasi Pendapatan
 - 3.1.2 Permasalahan yang dihadapi
- 3.2 Pengelolaan Belanja Daerah
 - 3.2.1 Target dan Realisasi Belanja
 - 3.2.2 Permasala yang dihadapi

Bab IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan
- 4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
 - 4.3.1 Pengukuran Aset
 - 4.3.2 Pengukuran Kewajiban
 - 4.3.3 Pengukuran Ekuitas
 - 4.3.4 Pengukuran Pendapatan LRA
 - 4.3.5 Pengukuran Belanja
 - 4.3.6 Pengukuran Pendapatan LO
 - 4.3.7 Pengukuran Beban

Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

- 5.1 Penjelasan Pos-pos LRA
 - 5.1.1 Pendapatan
 - 5.1.2 Belanja
 - 5.1.3 Pembiayaan
- 5.2 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan SAL (BLUD)
 - 5.2.1 Penggunaan SAL sebagai Pembiayaan Tahun Berjalan
 - 5.2.2 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)
 - 5.2.3 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya
- 5.3 Penjelasan Pos-pos Neraca
 - 5.3.1 Aset
 - 5.3.2 Kewajiban
 - 5.3.3 Ekuitas
- 5.4 Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional
 - 5.4.1 Kegiatan Operasional
 - 5.4.2 Kegiatan Non Operasional
 - 5.4.3 Pos Luar Biasa
 - 5.4.4 Surplus/Defisit LO
- 5.5 Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas (BLUD)
 - 5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi
 - 5.5.2 Arus Kas dari Investasi
 - 5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
 - 5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris



5.5.5 Saldo Kas di Bendahara Umum Daerah

5.5.6 Saldo Akhir Kas

5.6 Penjelasan Pos-pos LPE

5.6.1 Ekuitas Awal

5.6.2 Surplus/Defisit LO

5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/
Kesalahan Mendasar

5.6.4 Euitas Akhir

Bab VI Informasi Non Keuangan

6.1 Organisasi dan Tata Kerja SKPD Tahun Anggaran 2024

6.2 Rencana Strategis SKPD

6.3 Informasi Non Keuangan Lainnya

Bab VII Penutup



BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 EKONOMI MAKRO

Dalam konteks sistem ekonomi yang semakin terbuka, kinerja perekonomian daerah sangat bergantung pada berbagai kebijakan keuangan, baik fiskal maupun moneter. Faktor seperti suku bunga, inflasi, nilai tukar rupiah, serta kebijakan sektor lainnya turut memengaruhi kondisi ekonomi. Di tengah tantangan global yang ada, ekonomi daerah menghadapi beberapa persoalan yang harus segera diatasi, seperti ketergantungan pada dana perimbangan, rendahnya daya saing investasi, ketimpangan sosial, dan infrastruktur yang masih belum memadai.

Tantangan utama dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Kota Salatiga adalah sebagai berikut:

1. **Ketergantungan pada Dana Perimbangan:** Penerimaan daerah masih sangat bergantung pada dana perimbangan dari pusat, yang menyebabkan ketidakteraturan dalam pendapatan dan pengeluaran daerah.
2. **Iklm Investasi yang Belum Kondusif:** Perlu adanya **upaya** lebih dalam menciptakan iklim investasi yang lebih kompetitif, transparan, dan berbasis teknologi.
3. **Fluktuasi Ekonomi Global:** Perubahan kondisi **ekonomi** global mempengaruhi kestabilan ekonomi regional, yang berpotensi mengganggu sektor ekonomi lokal.
4. **Keterlambatan Infrastruktur:** Beberapa pembangunan **infrastruktur** strategis yang belum selesai menyebabkan penurunan daya saing daerah.
5. **Ketidaksinkronan Kebijakan Sektoral:** Adanya kebijakan **sektoral** yang kurang harmonis yang menghambat efisiensi dan efektivitas pembangunan ekonomi.

Menanggapi tantangan-tantangan tersebut, Pemerintah Daerah Kota Salatiga di tahun 2024 merumuskan kebijakan ekonomi makro yang fokus pada pemulihan ekonomi pasca pandemi, pengurangan kemiskinan, dan penanggulangan pengangguran. Kebijakan tersebut meliputi langkah-langkah berikut:

1. **Meningkatkan Stabilitas Ekonomi Daerah:** Mengoptimalkan sektor riil dengan menciptakan sinergi antar sektor untuk memperkuat daya tahan ekonomi daerah, khususnya melalui peningkatan produksi dan konsumsi domestik.



2. **Memacu Pertumbuhan Ekonomi melalui Investasi:** Mempermudah proses perizinan dan menciptakan iklim usaha yang kondusif guna menarik investor. Melalui pembangunan sarana dan prasarana yang memadai, diharapkan akan tercipta lapangan kerja baru yang akan mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan.
3. **Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan:** Meningkatkan produktivitas tenaga kerja melalui pelatihan, sertifikasi, dan pengembangan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
4. **Pemberdayaan Koperasi dan UMKM:** Meningkatkan peran koperasi dan UMKM sebagai kekuatan ekonomi lokal melalui inovasi, penerapan teknologi, dan penguatan kelembagaan yang dapat memperluas pasar serta meningkatkan daya saing.
5. **Peningkatan Investasi Pemerintah dan Swasta:** Mendorong peningkatan investasi yang berfokus pada sektor-sektor unggulan, baik dari pemerintah maupun sektor swasta, yang akan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan serta membuka lebih banyak lapangan kerja.
6. **Pengelolaan Pembangunan yang Efektif dan Efisien:** Pemerintah daerah akan memfokuskan pengelolaan pembangunan yang lebih efisien, transparan, dan tepat sasaran agar dapat memberi manfaat yang maksimal bagi masyarakat.
7. **Pengembangan Infrastruktur untuk Mendukung Ekonomi:** Mempercepat pembangunan sarana dan prasarana penunjang perekonomian daerah dengan pola kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta, untuk mengoptimalkan anggaran daerah yang terbatas.

Dengan kebijakan ini, diharapkan perekonomian Kota Salatiga dapat tumbuh secara inklusif, merata, dan berkelanjutan, serta mampu menghadapi tantangan-tantangan yang ada.

2.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai total dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu daerah dalam periode tertentu. PDRB mencerminkan kontribusi ekonomi daerah terhadap perekonomian nasional, dan dapat dihitung melalui tiga pendekatan utama: pendekatan produksi,



pengeluaran, dan pendapatan. Penyusunan PDRB dilakukan atas dasar harga berlaku dan harga konstan.

- **Pendekatan Produksi:** PDRB dihitung berdasarkan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh unit-unit produksi dalam berbagai sektor ekonomi di daerah tersebut. Sektor-sektor ini dikelompokkan dalam 17 kategori lapangan usaha, yang meliputi Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan, dan lain-lain.
- **Pendekatan Pendapatan:** Mengukur total balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang berkontribusi pada proses produksi di daerah tersebut, yang terdiri dari upah, sewa, bunga modal, dan keuntungan.
- **Pendekatan Pengeluaran:** Menghitung total pengeluaran konsumsi, investasi, dan ekspor-impor yang digunakan dalam perekonomian daerah. Komponen utama dalam pendekatan ini adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik, perubahan inventori, dan ekspor-neto.

PDRB dapat disajikan dalam dua versi penilaian:

1. **Harga Berlaku:** Menggunakan harga tahun berjalan.
2. **Harga Konstan:** Menggunakan harga tahun dasar tertentu, yang pada publikasi ini menggunakan harga tahun 2010.

PDRB Kota Salatiga Tahun 2024

Pada tahun 2024, Kota Salatiga mengalami perkembangan yang positif dalam pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan data yang dihimpun, PDRB Kota Salatiga atas dasar harga konstan tahun 2010 mengalami pertumbuhan yang signifikan. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023, berdasarkan data BPS, tercatat sebesar 5,75 persen, meningkat dari 4,80 persen pada tahun 2022.

Secara sektoral, sektor-sektor penyumbang utama terhadap PDRB Salatiga tahun 2023 adalah:

- **Sektor Transportasi dan Pergudangan** yang berkontribusi sebesar 50,45 persen
- **Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum** dengan kontribusi sebesar 15,30 persen
- **Jasa Lainnya** yang menyumbang sebesar 11,50 persen terhadap total PDRB.



Dari sisi inflasi, berdasarkan data BPS per Desember 2024, tingkat inflasi Kota Salatiga tercatat sebesar 0,75 persen, sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

PDRB Kota Salatiga Tahun 2023 menurut Pengeluaran:

- PDRB atas dasar harga berlaku sebesar **Rp16.500.000.000,00**
- PDRB atas dasar harga konstan 2010 sebesar **Rp11.500.000.000,00**

Tantangan dalam Pencapaian PDRB

Beberapa tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang optimal di Kota Salatiga antara lain:

1. **Ketergantungan pada Dana Perimbangan:** Sebagian besar penerimaan daerah masih bergantung pada dana perimbangan dari pemerintah pusat, yang berpotensi memengaruhi kemandirian fiskal daerah.
2. **Pengaruh Ekonomi Global:** Fluktuasi ekonomi global dan perubahan kebijakan pemerintah dapat berdampak pada inflasi dan daya saing daerah.
3. **Iklm Investasi:** Masih terdapat tantangan dalam menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif dan kompetitif untuk mendorong investasi jangka panjang.
4. **Pembangunan Infrastruktur:** Keterlambatan dalam pembangunan infrastruktur strategis yang mendukung kegiatan ekonomi.

Strategi untuk Meningkatkan PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Kota Salatiga

Untuk meningkatkan PDRB dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif, Pemerintah Daerah Kota Salatiga telah menetapkan kebijakan dan strategi yang berfokus pada pengembangan potensi daerah yang unggul. Beberapa langkah strategis yang diambil antara lain:

- **Pengembangan Infrastruktur:** Peningkatan infrastruktur dasar dan pendukung ekonomi daerah untuk memperlancar arus distribusi barang dan jasa.
- **Peningkatan Daya Saing UMKM:** Memberikan pelatihan dan fasilitasi bagi UMKM agar lebih produktif, berdaya saing, dan mampu menembus pasar yang lebih luas.
- **Investasi Berbasis Potensi Lokal:** Meningkatkan investasi yang berbasis pada sektor-sektor unggulan daerah, seperti pertanian, pariwisata, dan industri kreatif.



- **Mendukung Kewirausahaan Lokal:** Meningkatkan fasilitas bagi para pelaku usaha lokal untuk berkembang, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat jaringan pemasaran produk daerah.

Dengan kebijakan ini, diharapkan perekonomian Kota Salatiga dapat tumbuh lebih pesat dan berkelanjutan, serta memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

2.2 KEBIJAKAN KEUANGAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Salatiga Tahun Anggaran 2024 disusun sebagai rencana pengelolaan keuangan tahunan daerah yang berpedoman pada pencapaian kinerja dan hasil yang terukur. Penyusunan APBD ini dilakukan dengan pendekatan berbasis kinerja, yang mengutamakan efisiensi, efektivitas, serta pencapaian hasil dari program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Salatiga Tahun 2024–2026.

Proses Penyusunan APBD

Penyusunan APBD diawali dengan usulan program dan kegiatan dari setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Usulan tersebut kemudian dievaluasi dan dinilai tingkat kewajarannya melalui tahapan rasionalisasi dan sinkronisasi. Penilaian ini meliputi kesesuaian tugas pokok dan fungsi masing-masing satuan kerja dengan program yang diajukan, hubungan antara masalah yang akan diselesaikan dan prioritas kegiatan, serta kapasitas satuan kerja dalam melaksanakan kegiatan guna mencapai kinerja yang diinginkan.

Struktur Anggaran

Struktur APBD Kota Salatiga terdiri dari tiga komponen utama, yaitu:

1. **Pendapatan Daerah:** Pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah dari berbagai sumber, baik yang bersumber dari pajak daerah, retribusi, dana perimbangan, maupun pendapatan lain yang sah.
2. **Belanja Daerah:** Pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk membiayai program-program dan kegiatan pembangunan daerah yang berfokus pada pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, serta kegiatan yang mendukung perekonomian daerah.



3. **Pembiayaan Daerah:** Penggunaan dan sumber pembiayaan yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran daerah dan mendukung kegiatan pembangunan yang tidak dapat dibiayai sepenuhnya oleh pendapatan daerah.

Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan keuangan daerah Kota Salatiga untuk tahun 2024 difokuskan pada beberapa hal utama, antara lain:

1. **Peningkatan Pendapatan Daerah:** Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam mengoptimalkan potensi sumber pendapatan, seperti pajak daerah, retribusi, dan dana perimbangan. Selain itu, diupayakan diversifikasi sumber pendapatan untuk mengurangi ketergantungan pada dana perimbangan yang berasal dari pemerintah pusat.
2. **Pengelolaan Belanja yang Efektif dan Efisien:** Pemerintah Kota Salatiga akan memastikan bahwa belanja daerah difokuskan pada prioritas pembangunan yang dapat memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, dengan memperhatikan efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran.
3. **Prioritas Program Pembangunan:** Program-program yang diusulkan dalam APBD akan berfokus pada pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan publik, pengurangan angka kemiskinan, dan peningkatan perekonomian daerah berbasis potensi lokal. Semua program tersebut harus dapat terukur hasilnya dan memberikan kontribusi nyata terhadap kemajuan Kota Salatiga.
4. **Pemanfaatan Pembiayaan Daerah:** Dalam hal pembiayaan, kebijakan diarahkan pada penggunaan anggaran pembiayaan yang rasional, dengan memperhatikan kemampuan daerah dalam membayar kewajiban. Pemerintah daerah akan memanfaatkan pembiayaan untuk mendanai proyek-proyek strategis yang dapat meningkatkan kapasitas perekonomian daerah, terutama yang membutuhkan investasi jangka panjang.
5. **Kebijakan Pengelolaan Keuangan yang Transparan dan Akuntabel:** Pemerintah Kota Salatiga berkomitmen untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Penyusunan laporan keuangan dan anggaran akan dilakukan secara terbuka dan akurat, dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan dan evaluasi.



Kebijakan Keuangan Berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD)

Kebijakan keuangan daerah Kota Salatiga Tahun 2024 tidak terlepas dari target yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Salatiga Tahun 2024-2026. Dalam hal ini, pemerintah daerah akan fokus pada pengembangan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi, pemberdayaan UMKM, peningkatan sektor pendidikan dan kesehatan, serta pengembangan sektor pariwisata sebagai sektor unggulan. Pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan menjadi prioritas utama dalam kebijakan keuangan daerah.

Kesimpulan

APBD Kota Salatiga Tahun 2024 disusun dengan tujuan untuk memastikan keberlanjutan pembangunan daerah yang berbasis pada prioritas pembangunan yang sejalan dengan visi dan misi daerah. Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran, dengan mengutamakan pencapaian kinerja yang optimal dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

2.2.1 Kebijakan Anggaran Pendapatan

Kebijakan anggaran pendapatan merupakan upaya untuk mencapai seluruh penerimaan yang menjadi hak daerah dalam satu tahun anggaran, yang selanjutnya akan menjadi pendapatan daerah. Pendapatan daerah memegang peranan penting dalam mendukung penyediaan kebutuhan belanja daerah. Oleh karena itu, peningkatan pendapatan daerah harus dimanfaatkan seiring dengan momentum pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan potensi penerimaan daerah.

Peningkatan Pendapatan Daerah dapat dilakukan melalui beberapa langkah sebagai berikut:

- **Pelaksanaan Pemungutan Pendapatan Daerah:** Melakukan penajaman terhadap potensi riil sumber-sumber pendapatan daerah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemungutan pajak dan retribusi daerah.
- **Peningkatan Manajemen BUMD:** Meningkatkan efisiensi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan daya saing, dan memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), tanpa mengabaikan fungsi sosialnya.



- **Pengembangan BUMD:** Merintis usaha-usaha baru dan mengembangkan BUMD yang ada melalui kegiatan investasi yang dapat menghasilkan sumber pendapatan baru bagi daerah.
- **Efisiensi Pelayanan Teknis:** Meningkatkan efisiensi dan efektivitas unit pelayanan teknis daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, guna memperlancar proses pemungutan pendapatan.
- **Pengelolaan Aset Daerah:** Meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pengelolaan aset daerah agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, serta dapat memberikan kontribusi pada pendapatan daerah.
- **Pengembangan SDM:** Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia dalam pengelolaan pendapatan daerah melalui pelatihan dan pengembangan kapasitas.
- **Koordinasi Antar Perangkat Daerah:** Memperkuat koordinasi antar Perangkat Daerah penghasil pendapatan untuk optimalisasi potensi penerimaan daerah.
- **Pengembangan Sarana dan Prasarana:** Menyediakan fasilitas dan prasarana yang mendukung peningkatan pendapatan daerah.
- **Pengembangan Instrumen Regulasi:** Menyusun dan mengembangkan instrumen regulasi yang dapat menunjang optimalisasi potensi pendapatan riil daerah.
- **Pengembangan Keuangan Daerah:** Meningkatkan kemampuan keuangan daerah untuk menunjang keberlanjutan pembangunan dan pengelolaan pendapatan.

2.2.2 Kebijakan Anggaran Belanja

Belanja daerah diarahkan untuk meningkatkan proporsi belanja yang memihak kepentingan publik, dengan tetap menjaga keberlanjutan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kebijakan anggaran belanja disusun untuk mengutamakan pembiayaan pembangunan yang bersifat investasi dan strategis, serta pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, pangan, dan perluasan kesempatan kerja. Di samping itu, kebijakan belanja daerah juga harus mendukung upaya penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan sosial.

Belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kota, yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan, serta



urusan yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan antar pemerintah daerah.

Belanja daerah dibagi ke dalam beberapa kelompok, antara lain:

- **Belanja Pegawai:** Gaji dan tunjangan pegawai.
- **Belanja Bunga:** Pengeluaran untuk bunga pinjaman daerah.
- **Belanja Subsidi:** Bantuan subsidi kepada masyarakat.
- **Belanja Hibah:** Hibah kepada pihak ketiga yang memenuhi syarat.
- **Belanja Bantuan Sosial:** Pengeluaran untuk program-program sosial.
- **Belanja Bagi Hasil:** Pembagian hasil pajak dan retribusi dengan pemerintah pusat atau daerah lainnya.
- **Belanja Bantuan Keuangan:** Bantuan kepada daerah atau pihak lainnya yang membutuhkan.
- **Belanja Tidak Terduga:** Pengeluaran yang tidak dapat diprediksi.

Kebijakan belanja langsung mencakup pengeluaran yang terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang dianggarkan dalam belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Kebijakan belanja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga, misalnya, akan diarahkan untuk mendukung misi Dinas tersebut dalam pembangunan infrastruktur dan penataan ruang kota yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam penyusunan anggaran belanja, prinsip-prinsip yang dijadikan acuan adalah:

- **Partisipasi Masyarakat:** Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan anggaran.
- **Transparansi dan Akuntabilitas:** Menjamin bahwa anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat.
- **Disiplin Anggaran:** Memastikan pengelolaan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- **Keadilan Anggaran:** Membagi anggaran secara adil, baik antar sektor maupun antar kelompok masyarakat.
- **Efisiensi dan Efektivitas:** Memastikan bahwa anggaran digunakan seefisien mungkin untuk mencapai hasil yang maksimal.
- **Taat Azas:** Mematuhi asas-asas pengelolaan keuangan daerah yang baik dan benar.



2.2.3 Kebijakan Anggaran Pembiayaan

Pembiayaan daerah digunakan untuk menutupi selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Pengeluaran pembiayaan daerah terdiri dari belanja pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan penyertaan modal, pemberian pinjaman daerah, serta untuk menutupi defisit anggaran dan pembentukan dana cadangan.

Dalam penyusunan APBD, diupayakan agar belanja daerah tidak melebihi pendapatan daerah pada tahun anggaran yang bersangkutan. Jika terjadi surplus, penggunaan surplus akan difokuskan untuk membentuk dana cadangan. Namun, jika terjadi defisit, jumlah kumulatif defisit APBD tidak boleh melebihi 3 persen dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun tersebut. Pembiayaan juga dapat digunakan untuk memberikan pinjaman daerah atau sebagai modal dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat investasi jangka panjang.

2.3 INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

Realisasi pendapatan Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kota Salatiga sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp.1.896.350.060,00 atau sebesar 107,15 persen bila dibandingkan dengan pagu anggaran perubahan pendapatan tahun 2024 sebesar Rp1.769.800.000,00 yang merupakan Pendapatan Asli Daerah.

Realisasi belanja Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kota Salatiga sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp85.389.890.516,00 atau sebesar 92,74 persen bila dibandingkan dengan pagu anggaran perubahan belanja tahun 2024 sebesar Rp.92.077.026.717,00 dengan komposisi sebagai berikut:

1. Anggaran Belanja Operasi Rp.47.358.068.521,00 dengan realisasi Rp.41.580.208.377,00 atau sebesar 87,80 persen .
2. Anggaran Belanja Modal Rp.44.718.958.196,00 dengan realisasi Rp.43.809.682.139,00 atau sebesar 97,97 persen .

**Bab III****IKHTISAR CAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN****3.1 PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH****3.1.1 Target dan Realisasi Pendapatan****Pendapatan Asli Daerah** **Rp 1.896.350.060,00****Hasil Retribusi Daerah** **Rp 1.894.000.060,00**

Target : Rp 1.764.800.000,00

Realisasi : Rp 1.894.000.060,00

Prosentase : 107,32 persen

Hasil Retribusi Daerah DPUPR terdiri dari:

	URAIAN	TARGET	REALISASI	%
1	Retribusi Jasa Umum Retribusi Penyediaan dan atau Penyedotan Kakus	176.000.000,00	201.552.000,00	114,52
2	Retribusi Jasa Usaha Retribusi Pemakaian Ruangan Retribusi Pemakaian Alat	1.200.000,00 87.600.000,00	1.200.000,00 34.250.000,00	100,00 39,10
3	Retribusi Perijinan Tertentu Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.500.000.000,00	1.656.998.060,00	110,47
JUMLAH		1.764.800.000,00	1.894.000.060,00	107,32

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah **Rp2.350.000,00**

Target : Rp5.000.000,00

Realisasi : Rp2.350.000,00

Prosentase : 47,00 persen

Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan DPUPR terdiri dari Penjualan Drum Bekas.

3.1.2 Permasalahan Yang Dihadapi

Analisis Permasalahan:

Kurangnya Optimalisasi Sumber Pendapatan: Pendapatan lain-lain dari penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan masih belum dapat dimaksimalkan. Hal ini



disebabkan oleh belanja bahan material yang dahulu memakai aspal drum sekarang memakai latasir yang tidak memakai drum.

Pengelolaan yang Kurang Efektif: Proses penjualan aset dan pengawasan terhadap aset daerah mungkin belum sepenuhnya efisien, yang menyebabkan rendahnya realisasi pendapatan.

Prosedur yang Tidak Efisien: Proses administrasi yang panjang dan tidak efisien dalam penjualan aset dapat menghambat pencapaian target pendapatan daerah.

3.2 PENGELOLAAN BELANJA DAERAH

Belanja Daerah Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kota Salatiga Tahun 2024 diarahkan untuk memenuhi pelayanan dasar bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam rangka melaksanakan Tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan masyarakat Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, yang terdiri dari Belanja operasi dan Belanja modal.

3.2.1 Target dan Realisasi Belanja

Target dan realisasi belanja Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kota Salatiga Tahun Anggaran 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

Belanja Daerah **Rp 85.389.890.516,00**

Target : Rp 92.077.026.717,00

Realisasi : Rp 85.389.890.516,00

Prosentase : 92,74 persen

a. Belanja Operasi **Rp 41.580.208.377,00**

Target : Rp 47.358.068.521,00

Realisasi : Rp 41.580.208.377,00

Prosentase : 87,80 persen

	URAIAN	TARGET	REALISASI	PROSENTASE
1	Belanja Pegawai	6.958.105.540	6.135.990.311	88,18
2	Belanja Barang dan Jasa	39.856.673.381	34.905.061.307	87,58
3	Belanja Hibah	543.289.600	539.156.759	99,24
JUMLAH		47.358.068.521,00	41.580.208.377,00	87,80

**b. Belanja Modal****Rp 43.809.682.139,00**

Target : Rp 44.718.958.196,00

Realisasi : Rp 43.809.682.139,00

Prosentase : 97,97 persen

	URAIAN	TARGET	REALISASI	PROSENTASE
1	Belanja Modal Tanah	0	0	0,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	970.200.268	961.645.400	99,12
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	10.440.914.900	10.219.390.439	97,88
4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	33.307.843.028	32.628.646.300	97,96
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0	0	0,00
	JUMLAH	44.718.958.196,00	43.809.682.139,00	97,97

3.2.2 Permasalahan Yang Dihadapi

Secara keseluruhan, realisasi belanja daerah hanya mencapai 92,74 persen dari target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan adanya kendala dalam pelaksanaan program atau kegiatan yang telah direncanakan, terutama pada belanja operasi.

Realisasi belanja operasi hanya mencapai 87,80 persen, sehingga terdapat selisih cukup besar dibandingkan target yang ditentukan. Hal ini mencerminkan bahwa beberapa komponen belanja rutin, seperti biaya administrasi, gaji, dan operasional lainnya, belum terserap sepenuhnya.

Belanja modal hampir mencapai target dengan pencapaian 97,97 persen. Namun, masih terdapat sisa anggaran yang belum terealisasi, yang dapat disebabkan oleh keterlambatan pelaksanaan proyek atau kendala teknis dalam proses pembangunan infrastruktur.



BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. ENTITAS AKUNTANSI DAN ENTITAS PELAPORAN

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan Pengguna Anggaran / Pengguna Barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Sedangkan Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan.

Sebagai entitas pelaporan adalah Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang dalam hal ini adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR)

4.2. BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Salatiga disajikan dengan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011 tahun 2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan serta Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruwal pada Pemerintah Daerah. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan adalah Basis Akruwal.

Tujuan penggunaan Basis Akruwal:

1. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem keuangan (penganggaran, akuntansi dan pelaporan) dalam sektor publik.
2. Untuk meningkatkan pengendalian fiskal, manajemen aset dan budaya sektor publik.
3. Untuk meningkatkan akuntabilitas dalam program penyediaan barang dan jasa oleh pemerintah.
4. Menyediakan informasi yang lebih lengkap bagi pemerintah untuk pengambilan keputusan.
5. Untuk mereformasi sistem anggaran belanja (apropriasi)
6. Untuk mencapai transparansi yang lebih luas atas biaya pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah.



Laporan Keuangan yang di hasilkan oleh Entitas Akutansi sebagai entitas akutansi yang menghasilkan:

1. Laporan Realisasi Anggaran Entitas Akutansi

Laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh entitas Akutansi/Pemerintah Daerah, yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan.

2. Laporan Operasional

Laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/ daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode laporan.

3. Neraca Entitas Akutansi

Laporan yang menggambarkan posisi keuangan entitas akutansi/entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.

4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan pos-pos:

- a. Ekuitas Awal
- b. SuRplus/Defisit LO pada periode bersangkutan
- c. Koreksi-koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas
- d. Ekuitas Akhir

5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan naratif atau rincian dari angkayang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas.

**4.3. BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN
LAPORAN KEUANGAN**

Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Pengukuran pos-pos laporan keuangan ini menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Pengukuran lebih lanjut dapat dijelaskan sebagai berikut:



4.3.1. Pengukuran Aset

Aset dapat diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan aset nonlancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset non lancar. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, biaya dibayar di muka, dan persediaan. Sedangkan aset nonlancar meliputi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya. Aset nonlancar meliputi aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud, yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan Entitas Pelaporan atau yang digunakan masyarakat umum.

Dalam hal pengukuran aset, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas
 - Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.
 - Setara kas adalah investasi jangka pendek pemerintah yang sangat likuid, yang siap dicairkan menjadi kas, bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
 - Kas dan setara kas dibagi dalam 3 klasifikasi besar yaitu uang tunai, saldo simpanan di Bank, dan setara kas.
 - Kas dan setara kas diakui pada saat:
 - a. Memenuhi definisi kas dan/setara kas; dan
 - b. Penguasaan dan/atau kepemilikan telah beralih kepada pemerintah daerah
 - Kas dan setara kas dicatat berdasarkan nilai nominal yang disajikan dalam nilai rupiah.
 - Kas dan setara kas disajikan dalam Neraca
 - Kebijakan Akuntansi Investasi
 - Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti Bunga, deviden, dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
 - Investasi diklasifikasikan menjadi dua kelompok yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.
- Pengakuan investasi:



- a. Investasi jangka pendek dapat diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - 1) Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah dalam jangka waktu 12 bulan atau kurang; dan
 - 2) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).
 - b. Investasi jangka panjang dapat diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - 1) Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah dalam jangka waktu lebih dari 12 bulan; dan
 - 2) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).
- Pengukuran Investasi
- a. Investasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila investasi diperoleh tanpa biaya perolehan maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar.
 - b. Investasi jangka panjang, metode yang digunakan adalah metode biaya, metode ekuitas, metode nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).
- Penyajian/pengungkapan
- a. Investasi jangka pendek disajikan pada pos aset lancar di neraca. Sedangkan hasil dari investasi, seperti bunga diakui sebagai pendapatan dan disajikan pada LRA dan LO.
 - b. Investasi jangka panjang disajikan pada neraca menurut jenisnya, baik yang sifat non permanen maupun bersifat permanen. Investasi non permanen yang diragukan tertagih/terrealisasi disajikan sebagai pengurang investasi jangka non permanen.
 - c. Investasi non permanen yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan direklasifikasi menjadi bagian lancar investasi non permanen pada aset lancar.



- Kebijakan Akuntansi Piutang
 - Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah dan/atau hak Pemerintah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah, yang diharapkan diterima Pemerintah dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
 - Pengakuan piutang pemerintah diakui pada saat timbulnya hak tagih pemerintah karena adanya tunggakan pungutan pendapatan, perikatan, transfer antar pemerintahan dan kerugian daerah serta transaksi lainnya
 - Pengukuran piutang dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam surat ketetapan, surat penagihan dan nilai yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.
 - Metode untuk menghitung piutang yang tidak tertagih adalah metode pencadangan/penyisihan piutang tidak tertagih. Metode ini mengestimasi besarnya piutang-piutang yang tidak akan tertagih dan kemudian mencatat dan menyajikan nilai estimasi tersebut sebagai penyisihan piutang tidak tertagih, yang mengurangi nilai piutang bruto. Penyisihan piutang tidak tertagih dibentuk berdasarkan kualitas/umur piutang.
- Kebijakan Akuntansi Persediaan
 - Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
 - Persediaan merupakan aset yang berupa:
 - a. Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah,
 - b. Bahan atau perlengkapan (supplies) yang akan digunakan dalam proses produksi,
 - c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat,
 - d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.
 - Persediaan diakui pada saat:



- a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
 - b. Diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau kekuasaannya berpindah.
- Persediaan dicatat menggunakan metode:
- a. Metode *PeRpetual*, untuk jenis persediaan yang sifatnya continues dan membutuhkan kontrol yang besar seperti obat-obatan. Dengan metode *peRpetual*, pencatatan dilakukan setiap ada persediaan yang masuk dan keluar, sehingga nilai/jumlah persediaan selalu ter-*update*.
 - b. Dihapus.
- Persediaan disajikan sebesar:
- a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan, dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Hal yang mengurangi biaya perolehan persediaan: potongan harga dan rabat dan lainnya yang serupa.
 - b. Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.
 - c. Nilai wajar apabila persediaan diperoleh dari cara lainnya.
- Kebijakan Akuntansi Aset Tetap
 - Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
 - Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigrasi dan jaringan; aset tetap lainnya; serta konstruksi dalam pengerjaan (KDP).
 - Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Kriteria untuk dapat diakui sebagai aset tetap adalah:
 - a. Berwujud
 - b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan
 - c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara handal
 - d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas
 - e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan



- Aset tetap pada prinsipnya dinilai dengan biaya perolehan. Apabila biaya perolehan suatu aset adalah tanpa nilai atau tidak dapat diidentifikasi, maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
 - Komponen biaya perolehan aset terdiri dari:
 - a. Harga pembelian, termasuk bea impor dan pajak pembelian, setelah dikurangi dengan diskon dan rabat
 - b. Seluruh biaya yang secara langsung dapat dihubungkan/diatribusikan dengan aset dan membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
 - Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap hanya dapat dikapitalisasikan pada nilai aset jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran tersebut mengakibatkan bertambahnya masa manfaat, kapasitas, kualitas, dan volume aset yang telah dimiliki,
 - b. Pengeluaran tersebut memenuhi batasan minimal nilai kapitalisasi Aset Tetap/aset lainnya.
 - Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus yaitu dengan rumus nilai yang dapat disusutkan dibagi masa manfaat. Nilai yang dapat disusutkan adalah seluruh nilai perolehan aset dengan tidak memiliki nilai sisa (residu).
 - Perhitungan penyusutan aset tetap yang diperoleh tengah tahun menggunakan pendekatan tahunan yaitu penyusutan dihitung satu tahun penuh meskipun baru diperoleh satu atau dua bulan atau bahkan dua hari.
 - Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam CaLK.
 - Penyajian aset tetap berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan.
- Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan



- Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana yang relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
- Dana cadangan diakui pada saat terjadi pemindahan klasifikasi dari kas ke dana cadangan
- Dana cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari kas yang diklasifikasikan ke dana cadangan.
- Dana cadangan disajikan dalam Neraca pada kelompok aset non lancar. Rinciannya dijelaskan dan diungkapkan dalam CaLK.
- Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya
 - Aset lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan.
 - Aset lainnya antara lain:
 - a. Aset tak berwujud
 - 1) Aset tak berwujud didefinisikan sebagai aset yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Jenis aset tak berwujud antara lain: goodwill, hak paten, hak cipta, royalti, software, lisensi, hasil kajian penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.
 - 2) Aset tak berwujud diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari Aset Tak Berwujud tersebut akan mengalir kepada/dinikmati oleh entitas dan
 - b) Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan handal.
 - 3) Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tak Berwujud hingga siap untuk digunakan dan Aset Tak Berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk kedalam entitas tersebut.



b. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

- 1) Tuntutan Ganti Kerugian adalah hak tagih pemerintah daerah atas kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang.
- 2) TGR diakui pada saat terbitnya surat keterangan tanggung jawab mutlak atau surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara.
- 3) TGR diukur sebesar nominal yang tercantum dalam surat keterangan tanggung jawab mutlak atau surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara.

c. Aset kemitraan dengan pihak ketiga

- 1) Aset kerjasama/kemitraan adalah aset tetap yang dibangun atau digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan kerjasama/kemitraan.
- 2) Aset kerjasama/kemitraan diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset kerjasama/kemitraan.

d. Aset lain-lain

- 1) Aset lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan, tuntutan ganti rugi, dan kemitraan dengan pihak ketiga.
- 2) Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.
- 3) Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset lain-lain menurut nilai tercatatnya.

4.3.2. Pengukuran Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Kewajiban diklasifikasikan menjadi:

- Kewajiban Jangka Pendek

- Kewajiban jangka pendek adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi



pemerintahan dan masa pembayaran/pelunasan diharapkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban jangka pendek terdiri dari utang perhitungan fihak ketiga, utang bunga, bagian lancar utang jangka panjang, pendapatan diterima dimuka, utang beban dan utang jangka pendek lainnya.
- Pengakuan kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai dengan pada saat tanggal pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
- Kewajiban jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal dan disajikan dalam Neraca dan CaLK
- **Kewajiban Jangka Panjang**
 - Kewajiban jangka panjang adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
 - Kewajiban jangka panjang terdiri dari utang dalam negeri dan utang jangka panjang lainnya.
 - Kewajiban jangka panjang diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
 - Kewajiban jangka panjang dicatat sebesar nilai nominal dan harus diungkapkan dalam neraca pada periode pelaporan dengan nilai yang handal.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban Pemerintah Kota Salatiga pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang Pemerintah Kota Salatiga. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut. Penggunaan nilai



nominal dalam menilai kewajiban mengikuti karakteristik dari masing-masing pos.

4.3.3. Pengukuran Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Dalam basis akrual pemerintah hanya menyajikan satu jenis pos ekuitas. Saldo akhir ekuitas diperoleh dari perhitungan pada Laporan perubahan Ekuitas.

4.3.4. Pengukuran Pendapatan LRA

Dalam hal pendapatan, pengukuran dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Pendapatan LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan LRA diakui:
 - Pada saat diterima di rekening Kas Umum Daerah
 - Pada saat diterima oleh Bendahara Penerimaan yang sebagai pendapatan daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.
 - Pada saat Bendahara Pengeluaran di SKPD menerima pendapatan jasa giro/tabungan
 - Pada saat diterima entitas lain di luar pemerintah daerah atas nama BUD

4.3.5. Pengukuran Belanja

Pengukuran belanja dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah. Belanja diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkandan tercantum dalam dokumen sumber pengeluaran yang sah dan diukur berdasarkan azas bruto.
- Belanja disajikan dan diungkapkan dalam LRA sebagai pengeluaran daerah



4.3.6. Pengukuran Pendapatan LO

- Pendapatan LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Hak pemerintah tersebut dapat diakui sebagai pendapatan LO apabila telah timbul hak pemerintah untuk menagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi
- Pendapatan LO dilaksanakan azas bruto yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Entitas pemerintah menyajikan pendapatan LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan, disajikan dalam mata uang rupiah dan harus diungkapkan sedemikian rupa pada CaLK.

4.3.7. Pengukuran Beban

- Pengukuran Beban:

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa termasuk potensi pendapatan yang hilang atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode pelaporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Pengakuan dan pengukuran beban
 - a) Beban Operasi

Beban pegawai, jika pembayaran melalui mekanisme UP/GU/TU, diakui ketika bukti pembayaran beban telah disahkan pengguna anggaran sedangkan beban pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme LS diakui pada saat SP2D atau pada saat timbulnya kewajiban pemerintah.
 - b) Beban barang dan Jasa
 1. Beban persediaan dicatat pada saat pemakaian persediaan untuk kegiatan operasional.
 2. Beban jasa, pemeliharaan dan perjalanan dinas dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dsalam dokumen tagihan dari pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah mendapatkan persetujuan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.



3. Beban bunga diakui pada saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan.
4. Beban subsidi diakui pada saat kewajiban Pemerintah Daerah untuk memberikan subsidi telah timbul
5. Beban hibah dalam bentuk uang dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam nota perjanjian hibah
6. Beban bantuan sosial dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen keputusan pemberian bantuan sosial berupa uang atau dokumen pengadaan barang/jasa oleh Pihak Ketiga
7. Beban penyusutan diakui pada akhir tahun berdasarkan metode penyusutan yang telah ditetapkan.
8. Beban amortisasi diakui pada akhir tahun berdasarkan metode amortisasi yang telah ditetapkan
9. Beban piutang tak tertagih diukur dengan metode penyisihan piutang dan metode penghapusan langsung
10. Beban transfer diakui pada saat diterbitkan SP2D atau pada saat timbulnya kewajiban Pemerintah Daerah.

**BAB V****PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN****5.1 PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan salah satu komponen laporan keuangan pemerintah yang menyajikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding untuk suatu periode tertentu.

Dengan demikian, Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kota Salatiga sampai dengan 31 Desember 2024 dapat dilaporkan sebagai berikut:

No	URAIAN	TH. 2024			TH. 2023
		ANGGARAN	REALISASI	%	
1.	Pendapatan	1.769.800.000,00	1.896.350.060,00	107,15	3.232.964.068,00
2.	Belanja	92.077.026.717,00	85.389.890.516,00	92,74	79.181.595.931,00
	SILPA	(90.307.226.717)	(83.493.540.456)	92,45	(75.948.631.863,00)

Yang selanjutnya dapat diuraikan dalam sub.bab dibawah ini.

5.1.1 PENDAPATAN

Pendapatan SKPD Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kota Salatiga Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar :

No	URAIAN	TH. 2024			TH. 2023
		ANGGARAN	REALISASI	%	
1.	Pendapatan Retribusi Daerah	1.764.800.000,00	1.894.000.060,00	107,32	3.227.504.068,00
2.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.000.000,00	2.350.000,00	47,00	5.460.000,00
	JUMLAH	1.769.800.000,00	1.896.350.060,00	107,15	3.232.964.068,00

Pendapatan Retribusi Daerah**Rp1.894.000.060,00**

Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kota Salatiga mempunyai pos pendapatan retribusi daerah yang berupa pendapatan dari Sewa Alat Berat berupa *wales/slender* dan Retribusi Ijin Mendirikan Banguna serta Retribusi penyediaan dan atau Penyedotan Kaku.

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kota Salatiga pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp 1.894.000.060,00 atau sebesar 107,32 persen



dari Target Rp.1.764.800.000,00. Adapun rincian hasil retribusi daerah dapat dijabarkan sebagai berikut:

No	URAIAN	TH. 2024			TH. 2023
		ANGGARAN	REALISASI	%	
1.	Retribusi Jasa Umum				
-	Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	176.000.000,00	201.552.000,00	114,52	151.104.000,00
2	Retribusi Jasa Usaha				
-	Sewa Alat Berat	87.600.000,00	34.250.000,00	39,10	45.560.000,00
-	Sewa Rumah Dinas / Gedung Milik Pemda	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	1.200.000,00
3	Retribusi Perijinan Tertentu				
-	Persetujuan Bangunan Gedung	1.500.000.000,00	1.656.998.060,00	110,47	3.029.640.068,00
	JUMLAH	1.764.800.000,00	1.894.000.060,00	107,32	3.227.504.068,00

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Rp 2.350.000,00

Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kota Salatiga mempunyai pos pendapatan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang berupa Penjualan Drum Bekas. Pendapatan dari penjualan drum bekas ini ditargetkan senilai Rp5.000.000,00. Sedangkan pencapaian penjualan drum bekas telah terealisasi sejumlah 47,00 persen atau sebesar Rp2.350.000,00.

5.1.2 BELANJA

Belanja Daerah Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kota Salatiga Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp 85.389.890.516,00 dapat di uraikan sebagai berikut:

No	URAIAN	TH. 2024			TH. 2023
		ANGGARAN	REALISASI	%	
1.	Belanja Operasi	47.358.068.521,00	41.580.208.377,00	87,80	43.086.402.158,00
-	Belanja Pegawai	6.958.105.540,00	6.135.990.311,00	88,18	6.247.182.251,00
-	Belanja Barang dan Jasa	39.856.673.381,00	34.905.061.307,00	87,58	34.812.196.081,00
-	Belanja Hibah	543.289.600,00	539.156.759,00	99,24	2.027.023.826,00
2.	Belanja Modal	44.718.958.196,00	43.809.682.139,00	97,97	36.095.193.773,00
-	Peralatan dan Mesin	970.200.268,00	961.645.400,00	99,12	411.907.900,00
-	Gedung dan Bangunan	10.440.914.900,00	10.219.390.439,00	97,88	3.641.162.348,00
-	Jalan, Irigasi dan Jaringan	33.307.843.028,00	32.628.646.300,00	97,96	32.040.376.000,00
-	Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	1.747.525,00
	JUMLAH	92.077.026.717,00	85.389.890.516,00	92,74	79.181.595.931,00

**Belanja Operasi****Rp 41.580.208.377,00**

Anggaran Belanja dari pos Belanja Operasi sebesar **Rp 47.358.068.521,00** telah terealisasi sebesar **Rp 41.580.208.377,00** atau sebesar 87,80 persen. Realisasi Belanja Operasi tersebut, terdiri dari:

Belanja Pegawai**Rp 6.135.990.311,00**

Anggaran Belanja Operasi dari pos Belanja Pegawai adalah sebesar **Rp 86.958.105.540,00** terealisasi sebesar **Rp 6.135.990.311,00** atau sebesar 88,18 persen dengan rincian sebagai berikut:

No	URAIAN	TH. 2024			TH. 2023
		ANGGARAN	REALISASI	%	
1.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3.210.109.505,00	3.028.528.876,00	94,34	2.834.357.204,00
	Belanja Gaji Pokok ASN	2.230.658.360,00	2.173.320.295,00	97,43	2.029.753.480,00
	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	230.627.950,00	223.127.352,00	96,75	207.233.128,00
	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	210.190.050,00	188.685.000,00	89,77	191.210.000,00
	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	60.029.298,00	55.342.000,00	92,19	25.690.000,00
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	46.965.030,00	44.820.000,00	95,43	47.720.000,00
	Belanja Tunjangan Beras ASN	134.848.560,00	128.907.600,00	95,59	129.921.480,00
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	76.736.002,00	8.813.734,00	11,49	4.133.490,00
	Belanja Pembulatan Gaji ASN	80.795,00	27.462,00	33,99	31.367,00
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	199.954.860,00	187.576.308,00	93,81	182.055.505,00
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	5.285.910,00	4.477.293,00	84,70	4.152.181,00
	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	14.732.690,00	13.431.832,00	91,17	12.456.573,00
2.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.990.685.035,00	2.894.949.507,00	96,80	2.769.269.647,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.124.059.820,00	1.088.106.295,00	96,80	1.018.911.579,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	200.916.300,00	193.151.825,00	96,14	189.525.108,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	31.969.210,00	28.666.125,00	89,67	32.377.860,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.633.739.705,00	1.585.025.262,00	97,02	1.528.455.100,00
3.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	757.311.000,00	212.511.928,00	28,06	643.555.400,00
	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	72.570.000,00	69.011.928,00	95,10	68.885.400,00
	Belanja Honorarium	684.741.000,00	143.500.000,00	20,96	574.670.000,00
	JUMLAH	6.958.105.540,00	6.135.990.311,00	88,18	6.247.182.251,00

Belanja Barang dan Jasa**Rp 34.905.061.307,00**

Anggaran Belanja Operasi dari pos Belanja Barang dan Jasa adalah sebesar **Rp39.856.673.381,00** terealisasi sebesar **Rp34.905.061.307,00** sebesar **87,58 persen**. Realisasi belanja barang dan jasa tersebut dapat diperinci menurut kegiatannya sebagai berikut:



NO	URAIAN	TH. 2024			TH. 2023
		ANGGARAN	REALISASI	%	
1	Belanja Bahan Pakai Habis	27.338.295.946,00	23.692.989.519,00	86,67	22.604.967.038,00
2	Belanja Jasa Kantor	7.223.407.692,00	6.435.096.624,00	89,09	6.712.129.447,00
3	Belanja Premi Asuransi	76.500.800,00	53.098.883,00	69,41	95.478.620,00
4	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	22.500.000,00
5	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	4.267.810.943,00	3.882.360.795,00	90,97	4.169.214.155,00
6	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	148.218.000,00	147.625.210,00	99,60	695.481.775,00
7	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	67.200.000,00	47.500.000,00	70,68	71.750.000,00
8	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	151.000.000,00	135.165.608,00	89,51	62.955.741,00
9	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	584.240.000,00	511.224.668,00	87,50	377.719.305,00
	JUMLAH	39.856.673.381,00	34.905.061.307,00	87,58	34.812.196.081,00

Belanja Hibah**Rp 539.156.759,00**

Anggaran Belanja Operasi dari pos Belanja Hibah adalah sebesar **Rp 543.289.600,00** terealisasi sebesar **Rp 539.156.759,00** atau sebesar **99,24 persen**. Realisasi belanja barang dan jasa tersebut dapat diperinci menurut kegiatannya sebagai berikut:

No	URAIAN	TH. 2024			TH. 2023
		ANGGARAN	REALISASI	%	
1.	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	543.289.600,00	539.156.759,00	99,24	1.828.223.826,00
2.	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	0,00	0,00	0,00	198.800.000,00
	JUMLAH	543.289.600,00	539.156.759,00	99,24	2.027.023.826,00

Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat

URAIAN	NOMINAL
Pembangunan Kodim Kota Salatiga	199.281.600,00
Rumah Dinas DANREM Kota Salatiga	153.240.700,00
Rumah Dinas Kejaksaan	186.634.459,00
JUMLAH	539.156.759,00

**Belanja Modal****Rp 43.809.682.139,00**

Anggaran Belanja dari pos Belanja Modal sebesar **Rp 44.718.958.196,00** terealisasi sebesar **Rp 43.809.682.139,00** atau sebesar **97,97 persen**. Realisasi Belanja modal tersebut terdiri dari:

No	URAIAN	TH. 2024			TH. 2023
		ANGGARAN	REALISASI	%	
1	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	970.200.268,00	961.645.400,00	99,12	411.907.900,00
3	Belanja Modal Gedung & Bangunan	10.440.914.900,00	10.219.390.439,00	97,88	3.641.162.348,00
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	33.307.843.028,00	32.628.646.300,00	97,96	32.040.376.000,00
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	1.747.525,00
	JUMLAH	44.718.958.196,00	43.809.682.139,00	97,97	36.095.193.773,00

Belanja Tanah**Rp0,00**

Anggaran Belanja Modal dari pos Belanja Modal Tanah sebesar Rp 0,00.

Belanja Peralatan dan Mesin**Rp 961.645.400,00**

Anggaran Belanja Modal dari pos Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar **Rp970.200.268,00** terealisasi sebesar **Rp961.645.400,00** atau sebesar **99,12 persen** yang dapat dijabarkan sebagai berikut:



No	URAIAN	TH. 2024			TH. 2023
		ANGGARAN	REALISASI	%	
1	Belanja Modal Alat Bantu	45.000.000,00	44.100.000,00	98,00	31.200.000,00
2	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	723.928.200,00	720.350.000,00	99,51	69.000.000,00
3	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	1.211.000,00	0,00	0,00	3.996.000,00
4	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	1.430.568,00	1.280.000,00	89,47	355.200,00
5	Belanja Modal Alat Kantor	11.213.000,00	11.200.000,00	0,00	0,00
6	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	75.199.500,00	74.700.000,00	99,34	32.547.700,00
7	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	4.062.600,00	4.020.000,00	0,00	0,00
8	Belanja Modal Alat Studio	5.522.000,00	5.500.000,00	99,60	10.090.000,00
9	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	0,00	0,00	0,00	56.610.000,00
10	Belanja Modal Komputer Unit	68.345.400,00	67.095.400,00	98,17	0,00
11	Belanja Modal Peralatan Komputer	34.288.000,00	33.400.000,00	97,41	61.209.000,00
12	Belanja Modal Sumur	0,00	0,00	0,00	146.900.000,00
	JUMLAH	970.200.268,00	961.645.400,00	99,12	411.907.900,00

Belanja Gedung & Bangunan**Rp 10.219.390.439,00**

Anggaran Belanja Modal dari pos Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar **Rp10.440.914.900,00** dan terealisasi **Rp10.219.390.439,00** atau **97,88 persen**.

No	URAIAN	TH. 2024			TH. 2023
		ANGGARAN	REALISASI	%	
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	9.942.914.900,00	9.738.508.439,00	97,94	3.641.162.348,00
2	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	498.000.000,00	480.882.000,00	96,56	0,00
	JUMLAH	10.440.914.900,00	10.219.390.439,00	97,88	3.641.162.348,00

**Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan****Rp32.628.646.300,00**

Anggaran Belanja Modal dari pos Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar **Rp33.307.843.028.00** terealisasi sebesar **Rp32.628.646.300,00** atau **97,96 persen** yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

No	URAIAN	TH. 2024			TH. 2023
		ANGGARAN	REALISASI	%	
1	Pengadaan Jalan Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	22.666.212.728,00	22.245.768.000,00	98,15	16.126.893.000,00
2	Pengadaan Jembatan Jembatan pada Jalan Kota	0,00	0,00	0,00	2.260.987.000,00
3	Pengadaan Bangunan Air Irigasi Bangunan Pengambilan Irigasi Pengadaan Bangunan Pelengkap Irigasi	0,00 7.966.377.000,00	0,00 7.724.528.000,00	0,00 96,96	0,00 11.528.022.000,00
4	Pengadaan Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	2.675.253.300,00	2.658.350.300,00	99,37	2.124.474.000,00
	JUMLAH	33.307.843.028,00	32.628.646.300,00	97,96	32.040.376.000,00

Belanja Aset Tetap Lainnya**Rp0,00**

Tidak ada Anggaran Belanja Modal dari pos Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

No	URAIAN	TH. 2024			TH. 2023
		ANGGARAN	REALISASI	%	
1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Belanja Modal Buku Umum	0,00	0,00	0,00	1.747.525,00
	JUMLAH	-	-	-	1.747.525,00

Belanja Aset Lainnya**Rp0,00**

Anggaran Belanja Modal dari pos Belanja Modal Aset Lainnya sebesar Rp 0,00

5.1.3 PEMBIAYAAN**Rp0,00**

Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kota Salatiga tidak mempunyai alokasi Pos Pembiayaan. Pos Pembiayaan terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan dan tidak terdapat alokasi Pos Pembiayaan.



5.3 PENJELASAN POS-POS NERACA

Neraca Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kota Salatiga menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas. Dalam penyusunan neraca ini, basis akuntansi yang digunakan adalah basis akrual, dimana aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian/kondisi lingkungan berpengaruh pada kondisi keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

5.3.1. ASET

Total Aset Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kota Salatiga per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 1.578.728.056.967,51 dimana aset ini terdiri dari aset lancar, aset tetap, dan aset lainnya.

No	URAIAN	TH. 2024	TH. 2023
1	Aset Lancar	11.602.554.847,87	10.428.891.392,19
2	Aset Tetap	1.563.214.812.984,17	1.553.580.983.503,90
3	Aset Lainnya	3.910.689.135,47	3.969.769.635,47
JUMLAH		1.578.728.056.967,51	1.567.979.644.531,56

Aset Lancar

Rp 11.602.554.847,87

Aset lancar pada Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kota Salatiga terdiri dari Kas di Bendahara Pengeluaran, Piutang Retribusi, Cadangan Kerugian Piutang, Belanja Dibayar Di Muka yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional, dengan rincian sebagai berikut:

No	URAIAN	TH. 2024	TH. 2023
1	Piutang Retribusi	210.670.297,00	186.217.293,00
2	Penyisihan Piutang	-188.265.749,00	-116.737.667,00
3	Belanja di Bayar di Muka	0,00	36.069.492,00
4	Persediaan	11.580.150.299,87	10.323.342.274,19
JUMLAH		11.602.554.847,87	10.428.891.392,19

Kas di Bendahara Pengeluaran

Rp0,00

Rekening ini menggambarkan saldo kas di Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kota Salatiga per 31 Desember 2024, yaitu **NIHIL**.



No	URAIAN	TH. 2024	TH. 2023
1	Tunai	0,00	0,00
2	Saldo Bank		
	Rek. Bend. DPUPR (2033068002)	0,00	0,00
	Rek. Bend. Gaji DPUPR (3033124545)	0,00	0,00
3	Surat Berharga	0,00	0,00
	JUMLAH	0,00	0,00

Kas di Bendahara Penerimaan**Rp0,00**

Rekening ini menggambarkan saldo kas di Bendahara Penerimaan Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kota Salatiga per 31 Desember 2024, yaitu **NIHIL**.

Piutang Retribusi**Rp 210.670.297,00**

Jumlah Piutang Retribusi Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kota Salatiga per 31 Desember 2024 adalah sebesar **Rp 210.670.297,00**. Jumlah tersebut merupakan saldo Piutang Retribusi PBG sampai dengan 31 Desember 2023 yang telah dikurangi dengan pelunasan piutang tahun tersebut dan ditambah dengan piutang pada tahun berjalan.

No	URAIAN	DEBET	KREDIT
1	Piutang s.d. 31 Desember 2023	186.217.293,00	0,00
2	Pelunasan Piutang di tahun 2024	0,00	2.908.575,00
3	Penambahan Piutang Tahun 2024	27.361.579,00	0,00
	JUMLAH	213.578.872,00	2.908.575,00
	Piutang s.d. 31 Desember 2024	210.670.297,00	

Adapun lampiran Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tahun 2024 dan tahun sebelumnya yang menjadi dasar perhitungan piutang ini akan dilampirkan dalam lampiran.

Cadangan Kerugian Piutang**(Rp 188.265.749,00)**

Jumlah Cadangan Kerugian Piutang Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kota Salatiga per 31 Desember 2024 adalah sebesar **(Rp 188.265.749,00)**. Jumlah tersebut timbul karena terdapat perhitungan Piutang Retribusi sebesar Rp 210.670.297,00 sehingga Cadangan Kerugian Piutang nya dapat diuraikan sebagaimana tabel berikut:



PEMERINTAH KOTA SALATIGA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

NO	ID BILLING	TGL PENETAPAN	NOMINAL	TGL BAYAR	Kualitas Piutang	CKP 31/12/2023	CKP 31/12/2024
1	974/024/411	28/04/2020	6.390.000	-	Macet	6.390.000	6.390.000
2	974/027/411	11/05/2020	7.214.000	-	Macet	7.214.000	7.214.000
3	974/041/411	18/06/2020	3.618.000	-	Macet	3.618.000	3.618.000
4	974/053/411	13/07/2020	2.037.000	-	Macet	2.037.000	2.037.000
5	974/035/411	16/04/2021	3.562.000	-	Macet	3.562.000	3.562.000
6	974/034/411	16/04/2021	355.000	-	Macet	355.000	355.000
7	974/038/411	28/04/2021	713.000	-	Macet	713.000	713.000
8	974/089/411	21/07/2021	10.982.000	-	Macet	10.982.000	10.982.000
9	974/124/411	27/09/2021	1.583.000	-	Macet	1.583.000	1.583.000
10	974/062/411	09/05/2022	549.337	-	Macet	549.337	549.337
12	974/121/411	15/08/2022	18.937.376	-	Macet	18.937.376	18.937.376
13	974/137/411	13/09/2022	613.505	-	Macet	613.505	613.505
14	974/018/411	19/01/2023	108.071.670	-	Macet	54.035.835	108.071.670
15	974/110/411	21/07/2023	6.670.890	-	Macet	3.335.445	6.670.890
16	974/118/411	14/08/2023	391.716	-	Macet	195.858	391.716
17	974/126/411	04/09/2023	-	15/02/2024	Macet	1.454.288	-
18	974/156/411	05/10/2023	1.001.596	-	Macet	100.160	1.001.596
19	974/157/411	10/10/2023	10.618.628	-	Macet	1.061.863	10.618.628
20	900.1.13.1/036/411	14/03/2024	421.690		Diragukan		210.845
21	900.1.13.1/067/411	30/05/2024	4.061.291		Diragukan		2.030.646
22	900.1.13.1/101/411	22/07/2024	1.069.198		Diragukan		534.599
23	900.1.13.1/182/411	01/11/2024	19.328.144		Kurang Lancar		1.932.815
24	900.1.13.1/200/411	26/11/2024	642.076		Kurang Lancar		64.208
25	900.1.13.1/198/411	26/11/2024	1.839.180		Kurang Lancar		183.918
JUMLAH			210.670.297			116.737.667	188.265.749

Belanja Dibayar Di Muka

Rp0,00

Pada Tahun 2024 tidak terdapat belanja premi asuransi kendaraan dinas dan hanya menyelesaikan perhitungan asuransi tahun 2023 sebesar Rp43.212.550,00 Tanggal 01 November 2023 dengan periode asuransi dari tanggal 1 November 2023 sampai dengan 1 November 2024 pukul 12.00 WIB (Berkas terlampir).

No	Jenis Kendaraan	Tahun	NO POL	No Polis	Harga Tanggungan	Jumlah Premi
Pertanggungan 01 November 2023 - 01 November 2024						
1	Toyota Innova G	2018	H9509DK	IPFS020123003761	245.000.000,00	4.385.500,00
2	Toyota New Avanza 1.3G M/T	2014	H9524RB	IPFS020123003762	110.000.000,00	3.339.600,00
3	Toyota Avanza 1.3G M/T	2015	H1028XB	IPFS020123003763	115.000.000,00	3.345.925,00
4	Toyota Avanza 1.3G M/T	2016	H1093XB	IPFS020123003794	120.000.000,00	3.339.600,00
5	Toyota Avanza 1.3G M/T	2019	H9509GK	IPFS020123003768	165.000.000,00	4.438.500,00
6	Toyota Dyna 130 HT	2015	H8025XB	IPFS020123003778	166.000.000,00	1.344.600,00
7	Toyota Dyna 130 HT	2016	H8072XB	IPFS020123003813	237.000.000,00	1.919.700,00
8	Toyota Dyna 130 HT	2016	H8073XB	IPFS020123003814	237.000.000,00	1.919.700,00
9	Mitsubishi L300	2017	H8114XB	IPFS020123003837	125.000.000,00	1.012.500,00
10	Mitsubishi L300	2017	H8112XB	IPFS020123003890	125.000.000,00	1.012.500,00
11	Toyota Hilux PU 2.4 Dsl M/T	2019	H9583EB	IPFS020123003769	215.000.000,00	4.794.500,00
12	Toyota Hilux PU 2.4 Dsl M/T	2019	H9584EB	IPFS020123003843	215.000.000,00	4.794.500,00
13	Nissan X-Trail 2,0,2WD MT	2009	H31B	IPFS020123003795	115.000.000,00	4.218.775,00
14	Toyota Rush 1.5 G M/T	2009	H9503WB	IPFS020123003942	90.000.000,00	3.301.650,00
					Jumlah Premi	43.167.550,00
					Biaya Polis	45.000,00
					Total Premi	43.212.550,00

**Persediaan****Rp 11.580.150.299,87**

Jumlah persediaan Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kota Salatiga per 31 Desember 2024 adalah sebesar **Rp 11.580.150.299,87**. Jumlah tersebut merupakan saldo persediaan barang sampai dengan 31 Desember 2024, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	URAIAN	SALDO AWAL	PENGADAAN	MUTASI/ REKLAS	PEMAKAIAN	SALDO
1	Bahan Bangunan dan Konstruksi	2.602.597.874,19	6.526.162.119,00	-1.946.868.600,00	- 4.749.236.844,32	2.432.654.548,87
2	Bahan Bakar dan Pelumas	0,00	288.720.470,00		- 288.720.470,00	0,00
3	Isi Tabung Gas	0,00	401.000,00		- 401.000,00	0,00
4	Bahan Lainnya	0,00	65.130.200,00		- 65.130.200,00	0,00
5	Suku Cadang Lainnya	0,00	74.368.652,00		- 74.368.652,00	0,00
6	Alat Tulis Kantor	669.200,00	17.571.450,00		- 17.319.050,00	921.600,00
7	Kertas dan Cover	2.166.000,00	26.185.500,00		- 25.391.500,00	2.960.000,00
8	Bahan Cetak	6.243.000,00	125.491.250,00	-69.777.000,00	- 56.138.250,00	5.819.000,00
9	Benda Pos	0,00	8.600.000,00		- 7.300.000,00	1.300.000,00
10	Bahan Komputer	466.200,00	3.465.000,00		- 3.357.200,00	574.000,00
11	Alat Listrik	0,00	9.906.000,00		- 9.906.000,00	0,00
12	Perlengkapan Dinas	0,00	61.548.000,00		- 61.548.000,00	0,00
13	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0,00	20.603.200,00		- 20.603.200,00	0,00
14	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	7.711.200.000,00	16.274.679.928,00		- 14.849.958.777,00	9.135.921.151,00
15	Natura dan Pakan Lainnya	0,00	190.156.750,00	300.000,00	- 190.456.750,00	0,00
	JUMLAH	10.323.342.274,19	23.692.989.519,00	-2.016.345.600,00	-20.419.835.893,32	11.580.150.299,87

Persediaan Bahan Bangunan & Konstruksi**Rp 2.432.654.548,87**

Nilai dari persediaan ini dapat dirinci sebagaimana tabel berikut:

No	URAIAN	TH. 2024	TH. 2023
1	Saldo Awal	2.602.597.874,19	1.775.250.853,46
2	Pengadaan	6.526.162.119,00	9.050.500.268,00
3	Mutasi/ Reklas	-1.946.868.600,00	-2.608.436.256,00
4	Pemakaian	-4.749.236.844,32	-5.614.716.991,27
	Saldo Akhir	2.432.654.548,87	2.602.597.874,19

Saldo Awal bersumber dari saldo akhir tahun lalu. Pengadaan bersumber dari belanja barang senilai Rp 6.526.162.119,00. Sedangkan pemakaian didapatkan dari akun beban persediaan. Terdapat reklas dari persediaan menjadi Reklas ke Aset Bangunan Gedung Kantor sebesar Rp 928.690.250,00 ; Aset Bangunan Gedung Tempat Pertemuan sebesar Rp. 292.433.000,00 ; Reklas ke Aset angunan Gedung Tempat Pendidikan sebesar Rp. 304.238.750,00

**Persediaan Bahan Bakar dan Pelumas****Rp0,00**

Nilai dari persediaan ini dapat dirinci sebagaimana tabel berikut:

No	URAIAN	TH. 2024	TH. 2023
1	Saldo Awal	0,00	0,00
2	Pengadaan	288.720.470,00	307.765.252,00
3	Mutasi/ Reklas	0,00	323.000,00
4	Pemakaian	-288.720.470,00	-308.088.252,00
Saldo Akhir		0,00	0,00

Saldo Awal bersumber dari saldo akhir tahun lalu. Pengadaan bersumber dari belanja barang tahun pelaporan. Sedangkan pemakaian didapatkan dari akun beban persediaan.

Persediaan Isi Tabung Gas**Rp0,00**

Nilai dari persediaan ini dapat dirinci sebagaimana tabel berikut:

No	URAIAN	TH. 2024	TH. 2023
1	Saldo Awal	0,00	0,00
2	Pengadaan	401.000,00	407.000,00
3	Mutasi/ Reklas	0,00	0,00
4	Pemakaian	-401.000,00	-407.000,00
Saldo Akhir		0,00	0,00

Saldo Awal bersumber dari saldo akhir tahun lalu. Pengadaan bersumber dari belanja barang tahun pelaporan. Sedangkan pemakaian didapatkan dari akun beban persediaan.

Persediaan Bahan Lainnya**Rp0,00**

Nilai dari persediaan ini dapat dirinci sebagaimana tabel berikut:

No	URAIAN	TH. 2024	TH. 2023
1	Saldo Awal	0,00	0,00
2	Pengadaan	65.130.200,00	31.790.840,00
3	Mutasi/ Reklas	0,00	0,00
4	Pemakaian	-65.130.200,00	-31.790.840,00
Saldo Akhir		0,00	0,00

Saldo Awal bersumber dari saldo akhir tahun lalu. Pengadaan bersumber dari belanja barang tahun pelaporan. Sedangkan pemakaian didapatkan dari akun beban persediaan.

Persediaan Suku Cadang Lainnya**Rp0,00**

Nilai dari persediaan ini dapat dirinci sebagaimana tabel berikut:

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	URAIAN	TH. 2024	TH. 2023
1	Saldo Awal	0,00	0,00
2	Pengadaan	74.368.652,00	78.778.422,00
3	Mutasi/ Reklas	0,00	-323.000,00
4	Pemakaian	-74.368.652,00	-78.455.422,00
Saldo Akhir		0,00	0,00

Saldo Awal bersumber dari saldo akhir tahun lalu. Pengadaan bersumber dari belanja barang tahun pelaporan. Sedangkan pemakaian didapatkan dari akun beban persediaan.

Persediaan Alat Tulis Kantor**Rp 921.600,00**

Nilai dari persediaan ini dapat dirinci sebagaimana tabel berikut:

No	URAIAN	TH. 2024	TH. 2023
1	Saldo Awal	669.200,00	484.500,00
2	Pengadaan	17.571.450,00	35.606.600,00
3	Mutasi/ Reklas	0,00	0,00
4	Pemakaian	-17.319.050,00	-35.421.900,00
Saldo Akhir		921.600,00	669.200,00

Saldo Awal bersumber dari saldo akhir tahun lalu. Pengadaan bersumber dari belanja barang tahun pelaporan. Sedangkan pemakaian didapatkan dari akun beban persediaan.

Persediaan Kertas dan Cover**Rp 2.960.000,00**

Nilai dari persediaan ini dapat dirinci sebagaimana tabel berikut:

No	URAIAN	TH. 2024	TH. 2023
1	Saldo Awal	2.166.000,00	1.440.000,00
2	Pengadaan	26.185.500,00	27.004.400,00
3	Mutasi/ Reklas	0,00	0,00
4	Pemakaian	-25.391.500,00	-26.278.400,00
Saldo Akhir		2.960.000,00	2.166.000,00

Saldo Awal bersumber dari saldo akhir tahun lalu. Pengadaan bersumber dari belanja barang tahun pelaporan. Sedangkan pemakaian didapatkan dari akun beban persediaan.

Persediaan Bahan Cetak**Rp 5.819.000,00**

Nilai dari persediaan ini dapat dirinci sebagaimana tabel berikut:



No	URAIAN	TH. 2024	TH. 2023
1	Saldo Awal	6.243.000,00	0,00
2	Pengadaan	125.491.250,00	124.453.100,00
3	Mutasi/ Reklas	-69.777.000,00	-69.312.000,00
4	Pemakaian	-56.138.250,00	-48.898.100,00
	Saldo Akhir	5.819.000,00	6.243.000,00

Saldo Awal bersumber dari saldo akhir tahun lalu. Pengadaan bersumber dari belanja barang tahun pelaporan. Sedangkan pemakaian didapatkan dari akun beban persediaan.

Terdapat reklas keluar ke Persediaan Natura dan Pakan Lainnya dikarenakan kesalahan input belanja sebesar Rp. 300.000,00. Terdapat transaksi Mutasi Keluar Persediaan ke dinas-dinas di Kota Salatiga dan instansi vertikal sesuai dengan BA (terlampir).

Persediaan Benda Pos**Rp 1.300.000,00**

Nilai dari persediaan ini dapat dirinci sebagaimana tabel berikut:

No	URAIAN	TH. 2024	TH. 2023
1	Saldo Awal	0,00	3.000.000,00
2	Pengadaan	8.600.000,00	19.500.000,00
3	Mutasi/ Reklas	0,00	0,00
4	Pemakaian	-7.300.000,00	-22.500.000,00
	Saldo Akhir	1.300.000,00	0,00

Saldo Awal bersumber dari saldo akhir tahun lalu. Pengadaan bersumber dari belanja barang tahun pelaporan. Sedangkan pemakaian didapatkan dari akun beban persediaan

Persediaan Bahan Komputer**Rp 574.000,00**

Nilai dari persediaan ini dapat dirinci sebagaimana tabel berikut:

No	URAIAN	TH. 2024	TH. 2023
1	Saldo Awal	466.200,00	1.100.000,00
2	Pengadaan	3.465.000,00	3.936.200,00
3	Mutasi/ Reklas	0,00	0,00
4	Pemakaian	-3.357.200,00	-4.570.000,00
	Saldo Akhir	574.000,00	466.200,00

Saldo Awal bersumber dari saldo akhir tahun lalu. Pengadaan bersumber dari belanja barang tahun pelaporan. Sedangkan pemakaian didapatkan dari akun beban persediaan.

**Persediaan Alat Listrik****Rp0,00**

Nilai dari persediaan ini dapat dirinci sebagaimana tabel berikut:

No	URAIAN	TH. 2024	TH. 2023
1	Saldo Awal	0,00	0,00
2	Pengadaan	9.906.000,00	12.493.060,00
3	Mutasi/ Reklas	0,00	0,00
4	Pemakaian	-9.906.000,00	-12.493.060,00
Saldo Akhir		0,00	0,00

Saldo Awal bersumber dari saldo akhir tahun lalu. Pengadaan bersumber dari belanja barang tahun pelaporan. Sedangkan pemakaian didapatkan dari akun beban persediaan

Persediaan Perlengkapan Dinas**Rp0,00**

Nilai dari persediaan ini dapat dirinci sebagaimana tabel berikut:

No	URAIAN	TH. 2024	TH. 2023
1	Saldo Awal	0,00	0,00
2	Pengadaan	61.548.000,00	72.101.736,00
3	Mutasi/ Reklas	0,00	0,00
4	Pemakaian	-61.548.000,00	-72.101.736,00
Saldo Akhir		0,00	0,00

Saldo Awal bersumber dari saldo akhir tahun lalu. Pengadaan bersumber dari belanja barang tahun pelaporan. Sedangkan pemakaian didapatkan dari akun beban persediaan

Persediaan Alat/Bahan Keg. Kantor Lainnya**Rp0,00**

Nilai dari persediaan ini dapat dirinci sebagaimana tabel berikut:

No	URAIAN	TH. 2024	TH. 2023
1	Saldo Awal	0,00	0,00
2	Pengadaan	20.603.200,00	16.745.930,00
3	Mutasi/ Reklas	0,00	0,00
4	Pemakaian	-20.603.200,00	-16.745.930,00
Saldo Akhir		0,00	0,00

Saldo Awal bersumber dari saldo akhir tahun lalu. Pengadaan bersumber dari belanja barang tahun pelaporan. Sedangkan pemakaian didapatkan dari akun beban persediaan.

Persediaan Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat**Rp 9.135.921.151,00**

Nilai dari persediaan ini dapat dirinci sebagaimana tabel berikut:



No	URAIAN	TH. 2024	TH. 2023
1	Saldo Awal	7.711.200.000,00	9.299.626.000,00
2	Pengadaan	16.274.679.928,00	12.648.036.000,00
3	Mutasi/ Reklas	0,00	0,00
4	Pemakaian	-14.849.958.777,00	-14.236.462.000,00
Saldo Akhir		9.135.921.151,00	7.711.200.000,00

Saldo Awal bersumber dari saldo akhir tahun lalu. Pengadaan bersumber dari belanja barang tahun pelaporan. Sedangkan pemakaian didapatkan dari akun beban persediaan

Persediaan Natura & Pakan Lainnya**Rp0,00**

Nilai dari persediaan ini dapat dirinci sebagaimana tabel berikut:

No	URAIAN	TH. 2024	TH. 2023
1	Saldo Awal	0,00	0,00
2	Pengadaan	190.156.750,00	165.310.900,00
3	Mutasi/ Reklas	300.000,00	4.150.000,00
4	Pemakaian	-190.456.750,00	-169.460.900,00
Saldo Akhir		0,00	0,00

Saldo Awal bersumber dari saldo akhir tahun lalu. Pengadaan bersumber dari belanja barang tahun pelaporan. Sedangkan pemakaian didapatkan dari akun beban persediaan. Terdapat reklas dari Belanja cetak dikarenakan salah dalam input belanja.

ASET TETAP**Rp 1.563.214.812.984,17**

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Penyusunan Neraca memperhitungkan akumulasi penyusutan aset tetap, sehingga aset tetap milik Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kota Salatiga per 31 Desember 2024 dapat dirinci menurut jenisnya sebagai berikut:

No	ASET TETAP	TH. 2024	TH. 2023
1	Tanah	1.217.890.798.214,67	1.217.890.798.214,67
2	Peralatan dan Mesin	14.853.393.597,00	13.893.028.197,00
3	Gedung dan Bangunan	16.074.360.110,00	11.505.185.382,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	928.317.012.514,65	888.852.869.803,65
5	Aset Tetap Lainnya	1.652.093.345,00	1.652.093.345,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	11.919.061.391,00	11.552.118.776,00
7	Akumulasi Penyusutan	-627.491.906.188,15	-591.765.110.214,42
JUMLAH		1.563.214.812.984,17	1.553.580.983.503,90



Nilai aset tetap tersebut diatas, dapat diuraikan sebagai berikut:

URAIAN	SALDO AWAL	PENGADAAN	MUTASI	REKLAS/KOREKSI	SALDO
Tanah	1.217.890.798.214,67	0,00	0,00	0,00	1.217.890.798.214,67
Peralatan & Mesin	13.893.028.197,00	961.645.400,00	-	(1.280.000,00)	14.853.393.597,00
Gedung & Bangunan	11.505.185.382,00	10.219.390.439,00	(8.538.586.821,00)	2.888.371.110,00	16.074.360.110,00
Jalan, Irigasi & Jaringan	888.852.869.803,65	32.628.646.300,00	5.741.204.000	1.094.292.411,00	928.317.012.514,65
Aset Tetap Lainnya	1.652.093.345,00	-	0,00	-	1.652.093.345,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	11.552.118.776,00	-	-	366.942.615,00	11.919.061.391,00
Penyusutan	-591.765.110.214,42	(45.089.136.125,09)	-	9.362.340.151,36	(627.491.906.188,15)
TOTAL	1.553.580.983.503,90	(1.279.453.986,09)	(2.797.382.821,00)	13.710.666.287,36	1.563.214.812.984,17

Tanah**Rp1.217.890.798.214,67**

Aset Tanah per 31 Desember 2024 adalah sebesar **Rp1.217.890.798.214,67**. Nilai sebesar ini dapat diperoleh dari:

No	URAIAN	TH. 2024	TH. 2023
1	Saldo Awal	1.217.890.798.214,67	1.217.890.798.214,67
2	Pengadaan	0,00	0,00
3	Mutasi	0,00	0,00
4	Reclass	0,00	0,00
5	Lainnya	0,00	0,00
	Saldo Akhir	1.217.890.798.214,67	1.217.890.798.214,67

Peralatan dan Mesin**Rp 14.853.393.597,00**

Aset Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 adalah sebesar **Rp 14.853.393.597,00**. Nilai sebesar ini dapat diperoleh dari:

No	URAIAN	TH. 2024	TH. 2023
1	Saldo Awal	13.893.028.197,00	14.381.115.297,00
2	Pengadaan	961.645.400,00	411.907.900,00
3	Mutasi	0,00	-760.153.000,00
4	Reclass	-1.280.000,00	-139.842.000,00
5	Lainnya	0,00	0,00
	Saldo Akhir	14.853.393.597,00	13.893.028.197,00

*Reklass Aset Peralatan dan Mesin:*

Peralatan Tukang Kayu ke Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Kayu

Terdapat reklas keluar berupa Peralatan Tukang Kayu dari Belanja 004387/LS/DPUPR/XII/PT/2024 Tgl. 18/12/2024 senilai Rp. 1.280.000,00 ke Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Kayu karena barang berupa rantai chain saw sehingga itu langsung dipakai mengganti barang yang sudah rusak sehingga setelah dipelihara, alat tersebut dapat digunakan kembali.

Reklas menyesuaikan pengurus barang disesuaikan ke rekening yang lebih tepat.

Hauler ke Kendaraan Bermotor Khusus senilai Rp. 685.750.000,00

Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor ke Mebel senilai Rp. 29.600.000,00

Peralatan Studio Audio ke Peralatan Komputer Lainnya senilai Rp. 4.000.000,00

Peralatan Studio Video dan Film ke Alat Kantor Lainnya Rp. 11.200.000,00

Pengadaan Aset Peralatan dan Mesin

URAIAN	NOMINAL	KETERANGAN
Alat Kantor Lainnya	11.200.000	002/LPJ DPUPR/III/2024
Alat Pendingin	11.000.000	004/LPJ DPUPR/IV/2024
Kursi Kerja Pejabat	4.020.000	004/LPJ DPUPR/IV/2024
Peralatan Studio Audio	5.500.000	004/LPJ DPUPR/IV/2024
Peralatan Komputer Lainnya	4.000.000	004/LPJ DPUPR/IV/2024
Mebel	29.600.000	010/LPJ DPUPR/VI/2024
Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	3.900.000	026/LPJ DPUPR/XI/2024
Kendaraan Bermotor Khusus	685.750.000	05/PA/Truck Tinja/VII/2024
Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	34.600.000	01/TGH/Kendaraan.Roda.3/2024
Peralatan Tukang Kayu	1.280.000	03/RUTIN.JLN/tambal jalan 03/PA/X/2024
Pompa	44.100.000	00/TGH/POMPA
Mebel	30.200.000	BA-20240303-118019
Personal Computer	67.095.400	BAP-20240228-118060/BAST + BAP-20240221-118094
Peralatan Personal Computer	29.400.000	BAP-20241104-230496
JUMLAH	961.645.400	-

**Gedung dan Bangunan****Rp 16.074.360.110,00**

Aset Gedung dan Bangunan Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kota Salatiga per 31 Desember 2024 sebesar Rp 16.074.360.110,00. Nilai tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

No	URAIAN	TH. 2024	TH. 2023
1	Saldo Awal	11.505.185.382,00	10.313.338.413,00
2	Pengadaan	10.219.390.439,00	3.641.162.348,00
3	Mutasi	-8.538.586.821,00	-4.938.716.556,00
4	Reclass	2.888.371.110,00	2.489.401.177,00
5	Lainnya	0,00	0,00
	Saldo Akhir	16.074.360.110,00	11.505.185.382,00

Pengadaan Gedung dan Bangunan

URAIAN	NOMINAL
Pembangunan Aula Kelurahan Kecandran	1.476.044.000
Pembangunan Gedung Balai Serbaguna Sugihwaras Randuacir	329.670.000
Pembangunan Kantor Kelurahan Sidorejo Lor	1.540.200.000
Peningkatan IPLT	563.570.000
Pembangunan Gudang Cipta Karya DPUPR	480.953.000
Pembangunan Gudang Peralatan, Transit Operator dan KM/WC IPLT	192.987.695
Bangunan Pengolahan Air Limbah Cair	1.821.933.000
Pembangunan Gedung Ibadah Gereja Kristen Jawa (GKJ) Salatiga Utara	199.158.000
Pembangunan Pondok Pesantren	58.157.744
Pembangunan Gedung Ocehan di Kompleks Lapangan karangalit Dukuh	307.937.000
Lanjutan Pembangunan Taman Wisata Religi	2.767.898.000
Pagar Keliling Gudang Arsip BPKPD dan Gudang DPUPR	480.882.000
JUMLAH	10.219.390.439



Mutasi Aset Gedung dan Bangunan

URAIAN	SATUAN	NOMINAL	JUMLAH
MUTASI MASUK			292.923.923,00
Mutasi dari DPKP berdasar BA No. 900.1.3.3/793 Tgl. 31/10/2024 berupa : Bangunan Gedung Kantor (Bangunan atap dan Resepsionis) 540m2 senilai 310.397.673,14		292.923.923,00	
MUTASI KELUAR			8.831.510.744,00
Mutasi Pemeliharaan Gedung Tgl. 27/12/2024			
SekDa - BA 000.2.3.2/395		Rp 152.980.500,00	
Dishub - BA 000.2.3.2/396		Rp 143.682.500,00	
Dispangan - BA 000.2.3.2/397		Rp 263.515.000,00	
Disbudpar - BA 000.2.3.2/398		Rp 3.007.900.000,00	
Kec. Sidomukti - BA 000.2.3.2/399		Rp 1.899.109.000,00	
Disdik - BA 000.2.3.2/400		Rp 482.583.750,00	
Kec. Argomulyo - BA 000.2.3.2/401		Rp 380.733.750,00	
Kec. Tingkir - BA 000.2.3.2/402		Rp 143.015.000,00	
Dispersip - BA 000.2.3.2/403		Rp 54.914.000,00	
Kec. Sidorejo - BA 000.2.3.2/405		Rp 1.648.340.000,00	
BKPSDM - BA 000.2.3.2/407		Rp 67.017.750,00	
Diskominfo - BA 000.2.3.2/408		Rp 69.538.750,00	
Kesbangpol - BA 000.2.3.2/409		Rp 248.615.000,00	
Mutasi ke Lembaga Non Profit :			
Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin - BA No. 600.1/54.1 Tgl. 28/08/2024		Rp 60.597.744,00	
Pembangunan Gereja Kristen Jawa (GKJ) Salatiga Utara - BA No. 000.7.7.1/195 Tgl. 30/07/2024		Rp 208.968.000,00	
JUMLAH			(8.538.586.821,00)

Reklas Aset Gedung dan Bangunan

URAIAN	SATUAN	NOMINAL	JUMLAH
REKLAS MASUK			3.808.551.000,00
Reklas dari Persediaan			1.525.362.000,00
Bahan Bangunan dan Konstruksi		1.525.362.000,00	
REKLAS OP			807.145.000,00
Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum		807.145.000,00	
Reklas antar KIB C			1.476.044.000,00
Reklas KIB C Bangunan Gedung Kantor to Bangunan Gedung Tempat Pertemuan		1.476.044.000	
REKLAS KELUAR			1.476.044.000,00
Reklas antar KIB C			1.476.044.000,00
Reklas KIB C Bangunan Gedung Kantor to Bangunan Gedung Tempat Pertemuan		1.476.044.000	
JUMLAH			2.332.507.000,00



Pengadaan Aset Gedung dan Bangunan

No	URAIAN	TH. 2024
1	Pembangunan Gedung Ibadah Gereja Kristen Jawa (GKJ) Salatiga Utara	199.158.000,00
2	Pembangunan Aula Kelurahan Kecandran	1.476.044.000,00
3	Pembangunan Kantor Kelurahan Sidorejo Lor	1.540.200.000,00
4	Pembangunan Gudang Cipta Karya DPUPR	480.953.000,00
5	Pembangunan Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin	58.157.744,00
6	Pembangunan Gedung Balai Serbaguna Sugihwaras Randuacir	329.670.000,00
7	Peningkatan IPLT	563.570.000,00
8	Pagar Keliling Gudang Arsip BPKPD dan Gudang DPUPR	480.882.000,00
9	Pembangunan Gedung Ocehan di Kompleks Lapangan Karangalit Dukuh	307.937.000,00
10	Lanjutan Pembangunan Taman Wisata Religi	2.767.898.000,00
11	Pembangunan Gudang Peralatan, Transit Operator dan KM/WC IPLT	192.987.695,00
12	Bangunan Pengolahan Air Limbah cair	1.821.933.000,00
JUMLAH		10.219.390.439,00

Jalan, Irigasi dan Jaringan**Rp 928.317.012.514,65**

Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 928.317.012.514,65 dapat diuraikan sebagai berikut:

No	URAIAN	TH. 2024	TH. 2023
1	Saldo Awal	888.852.869.803,65	862.571.083.012,65
2	Pengadaan	32.628.646.300,00	32.040.376.000,00
3	Mutasi	5.741.204.000,00	-725.159.550,00
4	Reclass	1.094.292.411,00	-5.033.429.659,00
5	Lainnya	0,00	0,00
Saldo Akhir		928.317.012.514,65	888.852.869.803,65

Saldo Akhir Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang per 31 Desember 2024 menurut jenis, dapat diuraikan sebagai berikut:

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

NO	URAIAN	TH. 2024	TH. 2023
1	Jalan		
	Jalan Kota	601.670.503.365,56	580.817.199.365,56
	Jalan Desa	1.325.630.801,00	1.325.630.801,00
	Jalan Khusus	39.211.995.813,25	39.211.995.813,25
2	Jembatan		
	Jembatan pada Jalan Kota	57.941.920.563,00	50.430.770.563,00
3	Bangunan Air Irigasi		
	Bangunan Pengambilan Irigasi	747.339.000,00	747.339.000,00
	Bangunan Pembawa Irigasi	151.089.119.616,84	151.089.119.616,84
	Bangunan Pengaman Irigasi	138.215.333,00	138.215.333,00
	Bangunan Pelengkap Irigasi	61.327.122.562,00	53.080.434.151,00
4	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam		
	Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	13.202.042.860,00	10.349.042.560,00
6	Bangunan Air Kotor		
	Bangunan Pembuang Air Kotor	849.217.000,00	849.217.000,00
7	Instalasi Air Kotor		
	Instalasi Air Buangan Domestik	813.905.600,00	813.905.600,00
	JUMLAH	928.317.012.514,65	888.852.869.803,65

Pengadaan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan

NO	URAIAN	TH. 2024	TH. 2023
1	Jalan		
	Jalan Kota	22.245.768.000,00	16.126.893.000,00
2	Jembatan		
	Jembatan pada Jalan Kota	-	2.260.987.000,00
3	Bangunan Air Irigasi		
	Bangunan Pelengkap Irigasi	7.724.528.000,00	11.528.022.000,00
4	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam		
	Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai	2.658.350.300,00	2.124.474.000,00
	JUMLAH	32.628.646.300,00	32.040.376.000,00



Mutasi Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan

URAIAN	NOMINAL	JUMLAH
MUTASI MASUK		5.741.204.000,00
Mutasi Masuk Berdasar BA No. 000.2.3.2/163/III/BAST/2024 Tgl. 22/03/2024 dari BPKPD Berupa : 1.3.4.01.02.01.001 Jembatan pada Jalan Nasional Arteri - Jembatan Ngaglik ABC 2470969000, 1.3.4.01.02.01.001 Jembatan pada Jalan Nasional Arteri - Jembatan Jurang Gunting 3270235000	5.741.204.000	
MUTASI KELUAR		-
JUMLAH		5.741.204.000,00

REKLAS Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan

URAIAN	NOMINAL	JUMLAH
REKLAS MASUK OP		1.094.292.411,00
Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa □	81.470.344,00	
Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan □	94.500.000,00	
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air □	9.611.067,00	
Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi □	411.364.000,00	
Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	497.347.000,00	
JUMLAH		1.094.292.411,00

Aset Tetap Lainnya**Rp 1.652.093.345,00**

Aset Tetap Lainnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 1.652.093.345,00 dapat diuraikan sebagai berikut:

No	URAIAN	TH. 2024	TH. 2023
1	Saldo Awal	1.652.093.345,00	1.650.345.820,00
2	Pengadaan	0,00	1.747.525,00
3	Mutasi	0,00	0,00
4	Reclass	0,00	0,00
5	Lainnya	0,00	0,00
	Saldo Akhir	1.652.093.345,00	1.652.093.345,00

**Konstruksi Dalam Pengerjaan****Rp 11.919.061.391,00**

Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 11.919.061.391,00 dapat diuraikan sebagai berikut:

No	URAIAN	TH. 2024	TH. 2023
1	Saldo Awal	11.552.118.776,00	11.645.881.776,00
2	Pengadaan	0,00	0,00
3	Mutasi	0,00	-93.763.000,00
4	Reclass	366.942.615,00	0,00
5	Lainnya	0,00	0,00
Saldo Akhir		11.919.061.391,00	11.552.118.776,00

Penambahan KDP senilai Rp.366.942.615,00 berupa reklas Bangunan Gedung Kantor berupa Pembangunan Gedung Balai Serbaguna Sugihwaras Randuacir dikarenakan proses pembangunan belum selesai.

Akumulasi Penyusutan**(Rp. 627.491.906.188,15)**

Akumulasi Penyusutan Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kota Salatiga adalah sebesar (Rp 627.491.906.188,15). Akumulasi Penyusutan ini merupakan penyusutan atas Aset Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kota Salatiga Tahun 2024. Adapun rincian akumulasi penyusutan adalah sebagai berikut :



PEMERINTAH KOTA SALATIGA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	AKUMULASI PENYUSUTAN	TH. 2023	REKLAS /KOREKSI 2024	BEBAN 2024	MUTASI MASUK	MUTASI KELUAR	TH. 2024
	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin						
	Akumulasi Penyusutan Alat Besar	(5.463.166.629,39)	0,02	(580.822.537,17)			-6.043.989.166,54
	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan	(2.960.554.610,28)	0,02	(195.556.785,72)			-3.156.111.395,98
	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	(364.735.177,50)		(36.375.037,50)			-401.110.215,00
	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	(1.072.741.419,60)	-630.000,00	(55.601.722,00)			-1.128.973.141,60
	Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	(412.939.150,00)		(10.208.480,00)			-423.147.630,00
	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium	(98.677.219,00)		(26.063.625,00)			-124.740.844,00
	Akumulasi Penyusutan Komputer	(1.200.976.540,00)		(81.618.800,00)			-1.282.595.340,00
	JUMLAH	-11.573.790.745,77	-629.999,96	-986.246.987,39	0,00	0,00	-12.560.667.733,12

No	AKUMULASI PENYUSUTAN	TH. 2023	REKLAS /KOREKSI 2024	BEBAN 2024	MUTASI MASUK	MUTASI KELUAR	TH. 2024
	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan						
	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	(1.162.005.210,99)		(297.681.889,95)			-1.459.687.100,94
	Akumulasi Penyusutan Monumen	(55.428.868,00)		(4.327.886,00)			-59.756.754,00
	Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas	0,00		(10.109.440,00)			-10.109.440,00
	JUMLAH	-1.217.434.078,99	0,00	-312.119.215,95	0,00	0,00	-1.529.553.294,94



PEMERINTAH KOTA SALATIGA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	AKUMULASI PENYUSUTAN	TH. 2023	REKLAS /KOREKSI 2024	BEBAN 2024	MUTASI MASUK	MUTASI KELUAR	TH. 2024
	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi						0,00
	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan						
	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Kota	(494.387.362.695,33)	11.170.440.197,66	-32.162.166.116,70			-515.379.088.614,37
	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Desa	(1.325.630.801,00)					-1.325.630.801,00
	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Khusus	(24.901.038.508,91)	1.090.831.991,41	-4.451.286.327,28			-28.261.492.844,78
	Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan pada Jalan Nasional	0,00	0,00				0,00
	Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan pada Jalan Kota	(12.622.822.811,74)	(2.636.706.645,84)	-1.131.571.813,87			-16.391.101.271,45
	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air						0,00
	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi- Bangunan Pengambilan Irigasi	(15.251.816,33)	(15.251.816,33)	-15.251.816,33			-45.755.448,99
	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi- Bangunan Pembawa Irigasi	(36.545.764.759,44)	99.524.652,12	-3.132.334.237,90			-39.578.574.345,22
	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi- Bangunan Pengaman Irigasi	(33.892.994,93)	138.175,28	-3.868.907,90			-37.623.727,55
	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi- Bangunan Pelengkap Irigasi	(5.317.566.799,60)	(95.385.757,16)	-1.246.511.317,31			-6.659.463.874,07
	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan	0,00		-1.603.068.948,02			-1.603.068.948,02
	Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam						
	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan	(3.562.776.844,60)	(136.186.064,14)				-3.698.962.908,74
	Bencana Alam-Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai						
	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Kotor- Bangunan Pembuang Air Kotor	(11.323.315,55)	-116.059.234,45	-21.230.425,00			-148.612.975,00
	Akumulasi Penyusutan Instalasi						0,00
	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Kotor- Instalasi Air Buangan Domestik	(250.454.042,23)	1.624.652,77	-23.480.011,44			-272.309.400,90
	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Kotor- Instalasi Air Kotor Lainnya	0,00					0,00
	JUMLAH	-578.973.885.389,66	9.362.970.151,32	-43.790.769.921,75	0,00	0,00	-613.401.685.160,09

**ASET LAINNYA****Rp 3.910.689.135,47**

Aset Lainnya adalah aset yang tidak termasuk aset lancar dan aset tetap dan dimiliki dan digunakan oleh Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kota Salatiga untuk kegiatan pemerintahan dan pelayanan umum. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud dan piutang yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan serta barang yang diusulkan untuk dihapus. Aset Lainnya pada Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kota Salatiga dapat digambarkan sebagai berikut:

NO	URAIAN	TH. 2024	TH. 2023
1	Aset Tak Berwujud	330.792.000,00	330.792.000,00
2	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	(330.792.000,00)	(271.711.500,00)
3	Aset Lain Lain	3.910.689.135,47	3.910.689.135,47
JUMLAH		3.910.689.135,47	3.969.769.635,47

5.3.2 KEWAJIBAN**Rp 4.542.397,00**

Kewajiban berdasarkan likuiditasnya terbagi menjadi dua kelompok besar yaitu Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang hanya memiliki kewajiban jangka pendek sebesar Rp 4.542.397,00.

No	URAIAN	TH. 2024	TH. 2023
1	Utang Belanja Pegawai		
2	Utang Belanja Barang & Jasa		
	Utang Belanja Telepon	34.357,00	38.852,00
	Utang Belanja Air	2.890.400,00	1.934.150,00
	Utang Belanja Listrik	1.617.640,00	3.753.840,00
3	Utang Belanja Modal		
JUMLAH		4.542.397,00	5.726.842,00

Konsekuensi penggunaan basis akrual ini adalah diakui dan dicatatnya kewajiban belanja jasa akibat pemakaian beban jasa. Kewajiban hutang belanja jasa ini termasuk di dalam kewajiban jangka pendek yang akan langsung dibayar pada tahun berikutnya. Sehingga, untuk utang belanja jasa pada neraca 2024 Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kota Salatiga, yaitu sebesar Rp 4.542.397,00 yang merupakan utang belanja jasa listrik, air dan telepon, telah dibayar pada tahun 2025 melalui belanja listrik, air dan telepon.

**5.3.3 EKUITAS****Rp 1.578.723.514.570,51**

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Ekuitas dana pada neraca Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kota Salatiga per 31 Desember 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	URAIAN	TH. 2024	TH. 2023
1	Ekuitas Awal	1.567.973.917.689,56	1.594.573.538.639,08
2	Surplus Defisit - LO	0,00	
	Pendapatan	1.923.711.639,00	3.358.558.080,00
	Beban	-81.435.607.001,41	-101.128.596.291,21
	Defisit Penghapusan Aset	0,00	0,00
	Defisit Penjualan Aset Non Lancar	-3.009.737.842,54	0,00
	Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional	12.372.077.993,90	1.333.310.074,69
		0,00	
3	Lain-Lain	0,00	
	RK PPKD	83.493.540.456,00	75.888.781.863,00
	RK Aset	-2.527.817.077,00	-5.908.549.835,00
	RK Persediaan	-65.117.000,00	-60.648.000,00
	RK SKPD	0,00	59.850.000,00
	Lain-Lain	-1.454.287,00	-142.326.841,00
	JUMLAH	1.578.723.514.570,51	1.567.973.917.689,56

Pada Neraca Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kota Salatiga per 31 Desember 2024 diperoleh dari hasil penjumlahan antara akun Ekuitas Awal, SuRplus/Defisit LO, dan Lain-pada Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kota Salatiga Tahun 2024 yang kemudian didapat nilai sebesar **Rp 1.578.723.514.570,51**.

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS

Dari penjelasan pos-pos neraca Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kota Salatiga Tahun 2024 tersebut, apabila nilai ekuitas yaitu sebesar **Rp 1.578.723.514.570,51** ditambah dengan nilai kewajiban yaitu sebesar **Rp 4.542.397,00** maka diperoleh nilai yang sama dengan nilai aset, yaitu sebesar **Rp 1.578.728.056.967,51**.

5.4 PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan suRplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.



Laporan operasional Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kota Salatiga dapat dijelaskan sebagai berikut :

5.4.1 KEGIATAN OPERASIONAL

Dari kegiatan operasional Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kota Salatiga, surplus/defisit yang dihasilkan adalah sebesar (70.149.555.211,05). SuRplus/defisit ini merupakan hasil pendapatan kegiatan operasional yang telah dikurangi dengan beban dalam kegiatan operasional, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	URAIAN	TH. 2024	TH. 2023
1	Pendapatan	1.923.711.639,00	3.358.558.080,00
2	Beban	-81.435.607.001,41	-101.128.596.291,21
3	Surplus Defisit Non Operasional	9.362.340.151,36	1.333.310.074,69
JUMLAH		-70.149.555.211,05	-96.436.728.136,52

Pendapatan

Rp 1.923.711.639,00

Jumlah pendapatan dalam kegiatan operasional Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kota Salatiga per 31 Desember 2024 adalah sebesar **Rp 1.923.711.639,00**.

Adapun Rincian Pendapatan LO sebagai berikut:

No	URAIAN	TH. 2024	TH. 2023
1	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LO	201.552.000,00	151.104.000,00
2	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO	35.450.000,00	46.760.000,00
3	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	1.684.359.639,00	3.155.234.080,00
4	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan - LO	2.350.000,00	5.460.000,00
5	Pendapatan Hibah - LO	0,00	0,00
JUMLAH		1.923.711.639,00	3.358.558.080,00

Beban

Rp 81.435.607.001,41

Jumlah kegiatan operasional Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kota Salatiga dari pos beban adalah sebesar **Rp 81.435.607.001,41**. Beban dalam kegiatan operasional ini dapat diuraikan sebagai berikut:



No	URAIAN	TH. 2024	TH. 2023
1	Beban Pegawai	6.029.779.967,00	5.945.354.435,00
2	Beban Barang	20.419.835.893,32	21.358.049.986,27
3	Beban Jasa	8.304.039.367,00	8.374.018.414,00
4	Beban Pemeliharaan	136.445.608,00	62.955.741,00
5	Beban Perjalanan Dinas	511.224.668,00	377.719.305,00
6	Beban Hibah	813.082.503,00	2.688.476.465,00
7	Beban Penyusutan	45.148.216.625,09	62.251.788.387,94
8	Beban Penyisihan Piutang	72.982.370,00	70.233.557,00
9	Beban Lain-lain	0,00	0,00
JUMLAH		81.435.607.001,41	101.128.596.291,21

Beban Pegawai**Rp 6.029.779.967,00**

Beban pegawai Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kota Salatiga adalah sebesar **Rp 6.029.779.967,00** merupakan beban atas belanja pegawai Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kota Salatiga, baik dari belanja pegawai langsung maupun belanja pegawai tidak langsung. Rincian belanja pegawai ini dapat dirinci sebagai berikut.

NO	URAIAN	TH. 2024	TH. 2023
1	Gaji dan Tunjangan - LO	3.028.528.876,00	2.834.357.204,00
2	Tambahan Penghasilan PNS - LO	2.894.949.507,00	2.769.269.647,00
3	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	106.301.584,00	68.885.400,00
4	Uang Lembur - LO	0,00	0,00
5	Honorarium PNS	0,00	272.842.184,00
6	Honorarium Non PNS	0,00	0,00
JUMLAH		6.029.779.967,00	5.945.354.435,00

Beban Barang**Rp 20.419.835.893,32**

Beban Barang Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kota Salatiga adalah sebesar **Rp20.419.835.893,32**. Beban persediaan ini merupakan beban atas pemakaian persediaan Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kota Salatiga. Jumlah beban persediaan ini dapat di uraikan sebagai berikut:



NO	URAIAN	TH. 2024	TH. 2023
1	Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	4.749.236.844,32	5.614.716.991,27
2	Bahan Kimia	0,00	1.500.000,00
3	Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	288.720.470,00	308.088.252,00
4	Bahan-Isi Tabung Gas	401.000,00	407.000,00
5	Bahan-Bahan Lainnya	65.130.200,00	31.790.840,00
6	Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	74.368.652,00	78.455.422,00
7	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	17.319.050,00	35.421.900,00
8	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	25.391.500,00	26.278.400,00
9	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	56.138.250,00	48.898.100,00
10	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	7.300.000,00	22.500.000,00
11	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	3.357.200,00	4.570.000,00
12	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	0,00	4.887.330,00
13	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	9.906.000,00	12.493.060,00
14	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	61.548.000,00	72.101.736,00
15	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	20.603.200,00	16.745.930,00
16	Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	14.849.958.777,00	14.909.734.125,00
17	Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	0,00	0,00
18	Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	190.456.750,00	169.460.900,00
	JUMLAH	20.419.835.893,32	21.358.049.986,27

Beban Jasa**Rp 8.304.039.367,00**

Beban jasa Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kota Salatiga adalah sebesar **Rp8.304.039.367**. Beban jasa ini dapat diuraikan sebagai berikut:

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	URAIAN	TH. 2024	TH. 2023
1	Jasa Kantor	5.427.237.179,00	5.510.733.972,00
2	Premi Asuransi	89.168.375,00	93.185.060,00
3	Sewa Peralatan dan Mesin	0,00	22.500.000,00
4	Sewa Aset Tidak Berwujud	329.801.000,00	0,00
5	Jasa Konsultasi Konstruksi	2.262.707.603,00	1.980.367.607,00
6	Jasa Konsultasi Non Konstruksi	147.625.210,00	695.481.775,00
7	Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	47.500.000,00	71.750.000,00
JUMLAH		8.304.039.367,00	8.374.018.414,00

Beban Pemeliharaan**Rp 136.445.608,00**

Beban pemeliharaan Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kota Salatiga adalah sebesar **Rp 136.445.608,00** adapun rinciannya dapat diuraikan sebagai berikut:

No	URAIAN	TH. 2024	TH. 2023
1	Excavator	19.950.000,00	0,00
2	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0,00	11.300.000,00
3	Kendaraan Bermotor Penumpang	15.166.608,00	17.018.741,00
4	Alat Pendingin	0,00	0,00
5	Perkakas Bengkel Kayu	1.280.000,00	0,00
6	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	10.563.000,00	3.670.000,00
7	Personal Computer	29.391.000,00	26.877.000,00
8	Peralatan Komputer Lainnya	10.315.000,00	4.090.000,00
9	Alat Komunikasi Lainnya	49.780.000,00	0,00
10	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
11	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00
JUMLAH		136.445.608,00	62.955.741,00

Beban Perjalanan Dinas**Rp 511.224.668,00**

Beban perjalanan dinas Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kota Salatiga adalah sebesar **Rp 511.224.668,00**.

No	URAIAN	TH. 2024	TH. 2023
1	Beban Perjalanan Dinas	511.224.668,00	377.719.305,00
JUMLAH		511.224.668,00	377.719.305,00

**Beban Hibah****Rp 813.082.503,00**

Beban Hibah Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kota Salatiga adalah sebesar **Rp813.082.503,00**. Rincian Beban hibah dapat diuraikan sebagai berikut:

Uraian	NOMINAL
Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	543.516.759
Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	269.565.744
JUMLAH	813.082.503

Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat

URAIAN	NOMINAL
Pembangunan Rumdin Kejaksaan	186.634.459,00
Pembangunan Kodim	199.281.600,00
Pembangunan Rumdin Danrem	153.240.700,00
Persediaan Cetak RDTR Kantor Pertanahan	4.360.000,00
JUMLAH	543.516.759,00

Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan

URAIAN	NOMINAL
Pembangunan Gereja Kristen Jawa (GKJ) Salatiga Utara	208.968.000,00
Pembangunan Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin	60.597.744,00
JUMLAH	269.565.744,00

Beban Penyisihan Piutang**Rp 72.982.370,00**

Beban penyisihan piutang merupakan beban penyisihan piutang dari piutang retribusi IMB pada Tahun 2024 sebesar **Rp 72.982.370,00**.

No	URAIAN	TH. 2024	TH. 2023
1	Beban Penyisihan Piutang	72.982.370,00	70.233.557,00
	JUMLAH	72.982.370,00	70.233.557,00

Adapun rincian beban Penyisihan Piutang dapat diuraikan dalam tabel berikut:



URAIAN	CKP 2023	CKP 2024	BEBAN CKP
BAMBANG SUROSO	6.390.000,00	6.390.000,00	0,00
ZUHROTUN CHAYATI	7.214.000,00	7.214.000,00	0,00
RIZAL MILTIADES	3.618.000,00	3.618.000,00	0,00
MA SOEGIYANTO	2.037.000,00	2.037.000,00	0,00
DANIEL HINDARSOEN	3.562.000,00	3.562.000,00	0,00
FANDY ERIAWAN R	355.000,00	355.000,00	0,00
BUGAR FERDIAN	713.000,00	713.000,00	0,00
PT. CAMADA JAYA TEKNINDO	10.982.000,00	10.982.000,00	0,00
SURIPTO JOKO SUSILO	1.583.000,00	1.583.000,00	0,00
AHMAD SULTONI	549.337,00	549.337,00	0,00
ABDUL AZIZ MUSLIM	18.937.376,00	18.937.376,00	0,00
SIGIT HARIYADI	613.505,00	613.505,00	0,00
TIO YOKO WIDARWAN	54.035.835,00	108.071.670,00	54.035.835,00
NATAL TRI HERIONO	3.335.445,00	6.670.890,00	3.335.445,00
FL. SUSETYO ARYADI	195.858,00	391.716,00	195.858,00
MUKODIMAH	1.454.288,00	0,00	0,00
ENRICO NANDA NUGRAHA PRATAMA	100.160,00	1.001.596,00	901.436,00
BAMBANG POERWANTO	1.061.863,00	10.618.628,00	9.556.765,00
BINTANG ADRIANTO EKA PUTRA		210.845,00	210.845,00
ADHI ROESSENO KURNIAWAN		2.030.646,00	2.030.646,00
ERMINA HERAWATININGSIH		534.599,00	534.599,00
MARKUS HARYONO		1.932.815,00	1.932.815,00
WINARNI		64.208,00	64.208,00
FAUZY SATRIAWAN		183.918,00	183.918,00
JUMLAH	116.737.667,00	188.265.749,00	72.982.370,00

Beban Penyusutan**Rp 45.148.216.625,09**

Beban penyusutan Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kota Salatiga adalah sebesar **Rp 45.148.216.625,09**. Beban Penyusutan ini merupakan beban atas akumulasi penyusutan Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kota Salatigas Tahun berjalan. Adapun rincian beban penyusutan adalah sebagai berikut:

URAIAN	TH. 2024	TH. 2023
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	986.246.987,39	1.127.281.071,10
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	312.119.215,95	221.696.878,09
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	43.790.769.921,75	60.843.729.938,75
Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	59.080.500,00	59.080.500,00
	45.148.216.625,09	62.251.788.387,94

**5.4.2 KEGIATAN NON OPERASIONAL**

Kegiatan non operasional Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang adalah sebesar **Rp9.362.340.151,36**.

No	URAIAN	TH. 2024	TH. 2023
1	Surplus Kegiatan Non Operasional Lainnya	12.372.077.993,90	9.450.047.083,69
2	Defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya	-3.009.737.842,54	-8.116.737.009,00
	JUMLAH	9.362.340.151,36	1.333.310.074,69

Surplus Kegiatan Non Operasional Lainnya

Akun ini terisi dari Koreksi Saldo Awal dikarenakan penyesuaian perhitungan Pengurangan Akumulasi Penyusutan dengan eBMD sesuai BA Nomor : 000.2.3.2/262/BA/eBMD/2024 Tgl. 01/11/2024 dan 000.2.3.2 / 292 / 2024 Tgl. 31/12/2024

No	URAIAN	NOMINAL
	Akumulasi Penyusutan	
1	Bangunan Pembawa Irigasi	99.524.652,12
2	Bangunan Pengaman Irigasi	138.175,28
3	Instalasi Air Buangan Domestik	1.624.652,77
4	Pompa	0,02
5	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	0,02
6	Jalan Kota	11.170.440.197,66
7	Jalan Khusus	1.090.831.991,41
8	Jembatan pada Jalan Kota	9.518.324,62
	JUMLAH	12.372.077.993,90

Defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya

Akun ini terisi dari Penyesuaian eBMD dengan BA Nomor : 000.2.3.2/262/BA/eBMD/2024 Tgl. 01/11/2024 dan Koreksi Penyusutan sesuai BA Nomor : 000..3.2.3/140/2024 Tgl. 29/03/2024



No	URAIAN	NOMINAL
	Akumulasi Penyusutan	
1	Bangunan Pelengkap Irigasi	-95.385.757,16
2	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	-136.186.064,14
3	Bangunan Pembuang Air Kotor	-116.059.234,45
4	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	-630.000,00
5	Bangunan Pengambilan Irigasi	-15.251.816,33
6	Jembatan pada Jalan Nasional	-2.646.224.970,46
	JUMLAH	-3.009.737.842,54

5.4.3 POS LUAR BIASA

Kegiatan non operasional Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang tahun 2024 adalah sebesar **Rp 0,00**.

5.4.4 SURPLUS/ DEFISIT- LO

(Rp 70.149.555.211,05)

Dengan melihat penjelasan pos-pos Laporan Operasional Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kota Salatiga Tahun diatas, maka didapat SuRplus/Defisit-LO per 31 Desember 2024 sebesar **(Rp 70.149.555.211,05)**. Nilai tersebut diperoleh dari penjumlahan suRplus/defisit operasi, suRplus defisit kegiatan non operasional dan suRplus/defisit pos luar biasa.

5.6 PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kota Salatiga dapat dijelaskan sebagai berikut:



NO	URAIAN	TH. 2024	TH. 2023
1	EKUITAS AWAL	1.567.973.917.689,56	1.594.573.538.639,08
2	SURPLUS/DEFISIT - LO	-70.149.555.211,05	-96.436.728.136,52
3	LAIN-LAIN	0,00	0,00
4	Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
5	Koreksi Ekuitas Kas	0,00	0,00
6	Koreksi Piutang	-2.908.575,00	-264.117.399,00
7	Koreksi Penyisihan Piutang	1.454.288,00	121.790.558,00
8	Koreksi Aset Tetap	0,00	0,00
9	Koreksi Aset Tetap Penghapusan	0,00	0,00
10	Koreksi Ekuitas - Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	0,00	0,00
11	Koreksi Aset Lainnya	0,00	0,00
12	Koreksi Aset Tetap Antar OPD	0,00	0,00
13	Akun untuk dikonsolidasikan	80.900.606.379,00	69.979.434.028,00
14	RK SKPD		
	EKUITAS AKHIR	1.578.723.514.570,51	1.567.973.917.689,56

5.6.1 EKUITAS AWAL

Ekuitas awal dalam Laporan Perubahan Ekuitas Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kota Salatiga sebesar **Rp 1.567.973.917.689,56**. Dapat dirinci sebagai berikut:

ASET LANCAR		10.428.891.392,19
Kas Lainnya	0,00	
Piutang Retribusi	186.217.293,00	
Cad. Kerugian Piutang	-116.737.667,00	
Belanja Dibayar Di Muka	36.069.492,00	
Persediaan	10.323.342.274,19	
ASET TETAP		1.553.580.983.503,90
Tanah	1.217.890.798.214,67	
Peralatan & Mesin	13.893.028.197,00	
Gedung & Bangunan	11.505.185.382,00	
Jalan, Irigasi & Jaringan	888.852.869.803,65	
Aset Tetap Lainnya	1.652.093.345,00	
Konstruksi Dalam Pengerjaan	11.552.118.776,00	
Akumulasi Penyusutan	-591.765.110.214,42	
ASET LAIN-LAIN		3.969.769.635,47
Aset Tidak Berwujud	330.792.000,00	
Amortisasi Aset	-271.711.500,00	
Aset Lain	3.910.689.135,47	
TOTAL ASET		1.567.979.644.531,56
KEWAJIBAN		-5.726.842,00
EKUITAS AWAL 2024		1.567.973.917.689,56

**5.6.2 SURPLUS/DEFISIT - LO**

Dari laporan operasional Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kota Salatiga Tahun 2024, telah diperoleh suRplus/defisit LO, yaitu sebesar **(Rp 70.149.555.211,05)** Angka ini merupakan hasil dari penjumlahan suRplus/defisit dari kegiatan operasional, suRplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa sebagaimana telah dijelaskan pada Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional, yaitu:

No	URAIAN	TH. 2024	TH. 2023
1	Pendapatan	1.923.711.639,00	3.358.558.080,00
2	Beban	-81.435.607.001,41	-101.128.596.291,21
3	Kegiatan Non Operasional	9.362.340.151,36	1.333.310.074,69
	JUMLAH	-70.149.555.211,05	-96.436.728.136,52

5.6.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR

Pos dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar dalam Laporan Perubahan Ekuitas dapat diperoleh dari koreksi nilai persediaan, selisih revaluasi aset tetap dan lain-lain. Pada laporan perubahan ekuitas Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kota Salatiga, dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar, baik dari koreksi nilai persediaan maupun dari selisih revaluasi aset tetap dan lain-lain adalah sebesar **Rp 0,00**.

5.6.4 LAIN - LAIN

Pos lain-lain dalam Laporan Perubahan Ekuitas dapat diperoleh dari nilai perolehan ekuitas diluar kegiatan operasi. Pada pos lain-lain laporan perubahan ekuitas Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kota Salatiga diperoleh nilai sebesar **Rp 80.899.152.092,00** yang dapat diperinci sebagai berikut:



No	URAIAN	TH. 2024	TH. 2023
	LAIN-LAIN		
1	Koreksi Ekuitas Kas	0,00	0,00
2	Koreksi Piutang	-2.908.575,00	-264.117.399,00
3	Koreksi Penyisihan Piutang	1.454.288,00	121.790.558,00
4	Koreksi Aset Tetap	0,00	0,00
5	Koreksi Aset Tetap Penghapusan	0,00	0,00
6	Koreksi Ekuitas - Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	0,00	0,00
7	Koreksi Aset Lainnya	0,00	0,00
8	Koreksi Aset Tetap Antar OPD	0,00	0,00
9	Akun untuk dikonsolidasikan RK SKPD	80.900.606.379,00	69.979.434.028,00
	JUMLAH	80.899.152.092,00	69.837.107.187,00

Koreksi Ekuitas – Piutang**(Rp 2.908.575,00)**

Koreksi Ekuitas – Piutang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga sebesar **(Rp 2.908.575,00)**.

No	URAIAN	2024	2023
	Koreksi Ekuitas - Piutang Piutang Retribusi	- 2.908.575,00	- 264.117.399,00
	JUMLAH	-2.908.575,00	-264.117.399,00

Koreksi Ekuitas – Piutang timbul dikarenakan terdapat pelunasan piutang atas piutang tahun sebelumnya yaitu Piutang atasnama MUKODIMAH senilai (Rp. 2.908.575,00) dengan nomor SKRD 974/126/411 Tgl. 04/09/2023 dilunasi pada tanggal 15/02/2024

Koreksi Ekuitas – Penyisihan Piutang**Rp 1.454.288,00**

Koreksi Ekuitas – Penyisihan Piutang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga sebesar **Rp 1.454.288,00**.

No	URAIAN	2023	2023
	Koreksi Ekuitas - Penyisihan Piutang Retribusi	1.454.288,00	121.790.558,00
	JUMLAH	1.454.288,00	121.790.558,00



Saldo tersebut timbul dikarenakan hasil penyesuaian pelunasan Piutang atas nama MUKODIMAH yang mempunyai perhitungan CKP senilai Rp. 1.454.288,00 sehingga perlu disesuaikan pada tahun ini.

Akun untuk Dikonsolidasikan**Rp 80.900.606.379,00**

Akun untuk Dikonsolidasikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kota Salatiga ini didapat dari penjumlahan dari akun RK SKPD, RK Persediaan dan RK Aset sehingga bernilai **Rp 80.900.606.379**. Angka tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

No	URAIAN	TH. 2024	TH. 2023
1	RK PPKD	83.493.540.456,00	75.948.631.863,00
2	RK Persediaan	-2.527.817.077,00	-60.648.000,00
3	RK Aset	-65.117.000,00	-5.908.549.835,00
	JUMLAH	80.900.606.379,00	69.979.434.028,00

RK PPKD

RK PPKD merupakan selisih transaksi internal PPKD yaitu selisih antara Akun Pendapatan dan Akun Belanja. RK SKPD pada periode ini adalah Rp 83.493.540.456,00.

No	URAIAN	TH. 2024	TH. 2023
1	Pendapatan	1.896.350.060,00	3.232.964.068,00
2	Belanja	85.389.890.516,00	79.181.595.931,00
	JUMLAH	83.493.540.456,00	75.948.631.863,00

RK Persediaan

RK Persediaan ini merupakan penggambaran dari adanya Mutasi Keluar/ Mutasi Masuk Persediaan antar SKPD. Saldo RK Persediaan pada periode ini adalah sebesar (Rp65.117.000,00) bersumber dari Mutasi Masuk dan Mutasi Keluar.



No	URAIAN	BA	NOMINAL
	Penyerahan Persediaan Peta Papan Informasi RTRW Tgl.	22/02/2024	
1	Kec. Tingkir	000.2.3.2/137/2024	1.208.000,00
2	Kec. Sidomukti	000.2.3.2/135/2024	755.000,00
3	Kec. Sidorejo	000.2.3.2/134/2024	1.057.000,00
4	Kec. Argomulyo	000.2.3.2/136/2024	1.057.000,00
	Penyerahan Persediaan Cetak Peraturan Walikota Salatiga No. 43 Tahun 2024 Rencana Detail Penataan Ruang Tahun 2024-2044 : Buku Perwali RDTR, Lampiran Album Peta A3 RDTR, Album Peta A1	18/01/2024	
1	DLH□	000.2.3.2/264/2024	4.360.000,00
2	DPKP	000.2.3.2/261/2024	4.360.000,00
3	BAPPEDA	000.2.3.2/259/2024	4.360.000,00
4	DISPERINAKER	000.2.3.2/262/2024	4.360.000,00
5	DPMPTSP□	000.2.3.2/260/2024	4.360.000,00
6	Bagian Hukum Setda	000.2.3.2/257/2024	4.360.000,00
7	Bagian Pemerintahan Setda□	000.2.3.2/258/2024	4.360.000,00
8	BPBD□	000.2.3.2/265/2024	4.360.000,00
9	Satpol PP	000.2.3.2/266/2024	4.360.000,00
10	Dispangtan	000.2.3.2/263/2024	4.360.000,00
12	Kec. Tingkir□	000.2.3.2/267/2024	4.360.000,00
13	Kec. Sidomukti□	000.2.3.2/270/2024	4.360.000,00
14	Kec. Sidorejo□	000.2.3.2/269/2024	4.360.000,00
15	Kec. Argomulyo□	000.2.3.2/268/2024	4.360.000,00
JUMLAH RK PERSEDIAAN			65.117.000,00

RK Aset

RK Aset ini merupakan penggambaran dari adanya Mutasi Keluar/ Mutasi Masuk Aset antar SKPD. Saldo RK Aset pada periode ini adalah sebesar (Rp 2.527.817.077,00).



No	URAIAN	NOMINAL
1	Mutasi Masuk Berdasar BA No. 000.2.3.2/163/III/BAST/2024 Tgl. 22/03/2024 dari BPKPD Berupa : 1.3.4.01.02.01.001 Jembatan pada Jalan Nasional Arteri - Jembatan Ngaglik ABC 2470969000 1.3.4.01.02.01.001 Jembatan pada Jalan Nasional Arteri - Jembatan Jurang Gunting 3270235000	5.741.204.000,00
2	Mutasi masuk Gedung Kantor dari DPKP berdasar BA No. 900.1.3.3/793 Tgl. 31/10/2024 berupa : Bangunan Gedung Kantor (Bangunan atap dan Resepsionis) 540m2 senilai 29.2923.923	292.923.923,00
3	Mutasi Keluar Pemeliharaan Gedung sesuai BA Tgl 27/12/2024 : sesuai seperti di Kertas Kerja Pemeliharaan Gedung	-8.561.945.000,00
JUMLAH RK ASET		-2.527.817.077,00

5.6.4 EKUITAS AKHIR**Rp 1.578.723.514.570,51**

Ekuitas akhir dalam Laporan Perubahan Ekuitas Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kota Salatiga ini didapat dari penjumlahan ekuitas awal, dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar, pos lain-lain dan suRplus/defisit LO sebagaimana dijelaskan di atas, sehingga didapat nilai **Rp 1.578.723.514.570,51**.

Ekuitas akhir ini untuk kemudian akan digunakan sebagai ekuitas awal pada Laporan Perubahan Ekuitas Tahun berikutnya.



BAB VI

INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 ORGANISASI DAN TATA KERJA OPD

ORGANISASI DAN TATA KERJA OPD

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Kota Salatiga Nomor 24 Tahun 2024 Tentang Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Tata Ruang;
- d. Bidang Bina Marga;
- e. Bidang Pengairan;
- f. Bidang Cipta Karya;
- g. UPTD; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

URAIAN TUGAS

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Kota Salatiga Nomor 24 Tahun 2024 Tentang Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan Daerah serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

STRUKTUR DAN TUGAS DPUPR KOTA SALATIGA

Kepala Dinas

Kepala Dinas memiliki peran utama dalam memimpin dan mengarahkan seluruh pelaksanaan tugas serta fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR). Dengan kepemimpinan strategis, Kepala Dinas memastikan semua kebijakan dan program berjalan sesuai peraturan yang berlaku



Sekretariat

Sebagai pendukung utama Kepala Dinas, Sekretariat bertugas memberikan layanan administratif yang efisien di bidang perencanaan, keuangan, umum, dan kepegawaian.

Dipimpin oleh seorang Sekretaris, Sekretariat melaksanakan fungsi berikut:

- Koordinasi dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan pekerjaan umum dan penataan ruang.
- Pemantauan serta evaluasi kebijakan yang telah diimplementasikan.
- Pelayanan administrasi yang mendukung kegiatan kedinasan

Struktur Sekretariat terdiri dari:

- Subbagian Umum dan Kepegawaian
- Subbagian Perencanaan dan Keuangan

Bidang Tata Ruang

Bidang ini bertanggung jawab untuk mengelola perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang, termasuk penataan bangunan dan lingkungannya. Dipimpin oleh Kepala Bidang, tugas utama Bidang Tata Ruang mencakup:

- Merumuskan kebijakan terkait tata ruang.
- Melaksanakan kebijakan tata ruang yang telah dirancang.
- Mengelola fungsi lain sesuai arahan Kepala Dinas.

Bidang Tata Ruang memiliki tiga kelompok substansi:

- Perencanaan Ruang
- Pemanfaatan Ruang

Bidang Bina Marga

Untuk mendukung konektivitas dan mobilitas warga, Bidang Bina Marga bertugas menangani perencanaan, pembangunan, serta pemeliharaan jalan dan jembatan. Fungsi utama bidang ini meliputi:

- Merancang kebijakan terkait pembangunan dan pemeliharaan jalan.
- Melaksanakan program pembangunan jalan dan jembatan.
- Memastikan kualitas infrastruktur yang menunjang aksesibilitas.



Kelompok substansinya terdiri atas:

- Perencanaan dan Pengendalian Jalan Jembatan
- Pemeliharaan Jalan Jembatan
- Pembangunan Jalan Jembatan

Bidang Pengairan

Bidang Pengairan memainkan peran penting dalam pengelolaan sumber daya air dan drainase. Dengan fokus pada perencanaan, pengendalian, operasi, dan pembangunan prasarana pengairan, tugas utama bidang ini adalah:

- Merumuskan kebijakan pengelolaan air yang efisien.
- Melaksanakan pengembangan infrastruktur pengairan untuk masyarakat.
- Memastikan operasi dan pemeliharaan prasarana berjalan optimal.

Kelompok substansi di bidang ini adalah:

- Perencanaan dan Pengendalian Prasarana Pengairan
- Operasi dan Pemeliharaan Prasarana Pengairan
- Pembangunan dan Peningkatan Prasarana Pengairan

Bidang Cipta Karya

Bidang ini bertanggung jawab atas penyediaan infrastruktur dasar, seperti air minum, sanitasi, permukiman, dan bangunan gedung. Dengan pendekatan inovatif, tugas Bidang Cipta Karya meliputi:

- Membuat kebijakan terkait pembangunan gedung dan jasa konstruksi.
- Melaksanakan rehabilitasi dan pengembangan gedung.
- Menjamin ketersediaan air minum dan sanitasi yang layak bagi masyarakat.

Substansi tugasnya terbagi menjadi:

- Perencanaan dan Pengendalian Gedung serta Pembinaan Jasa Konstruksi
- Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung
- Air Minum dan Sanitasi



Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)

Pada Dinas, dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang memiliki peran penting dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang tertentu. Pembentukan UPTD ini bertujuan untuk mendukung kinerja Dinas dalam melaksanakan tugas secara lebih efektif dan efisien. Ketentuan lebih lanjut terkait organisasi dan tata kerja UPTD ini akan diatur dalam Peraturan Wali Kota yang terpisah.

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional adalah unsur penting yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, atau Kepala Subbagian, sesuai dengan kaitannya dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional yang dimiliki. Dalam struktur ini, Pejabat Fungsional terdiri dari berbagai jenjang, baik keterampilan maupun keahlian, yang terbagi dalam kelompok-kelompok sesuai dengan bidang spesialisasinya.

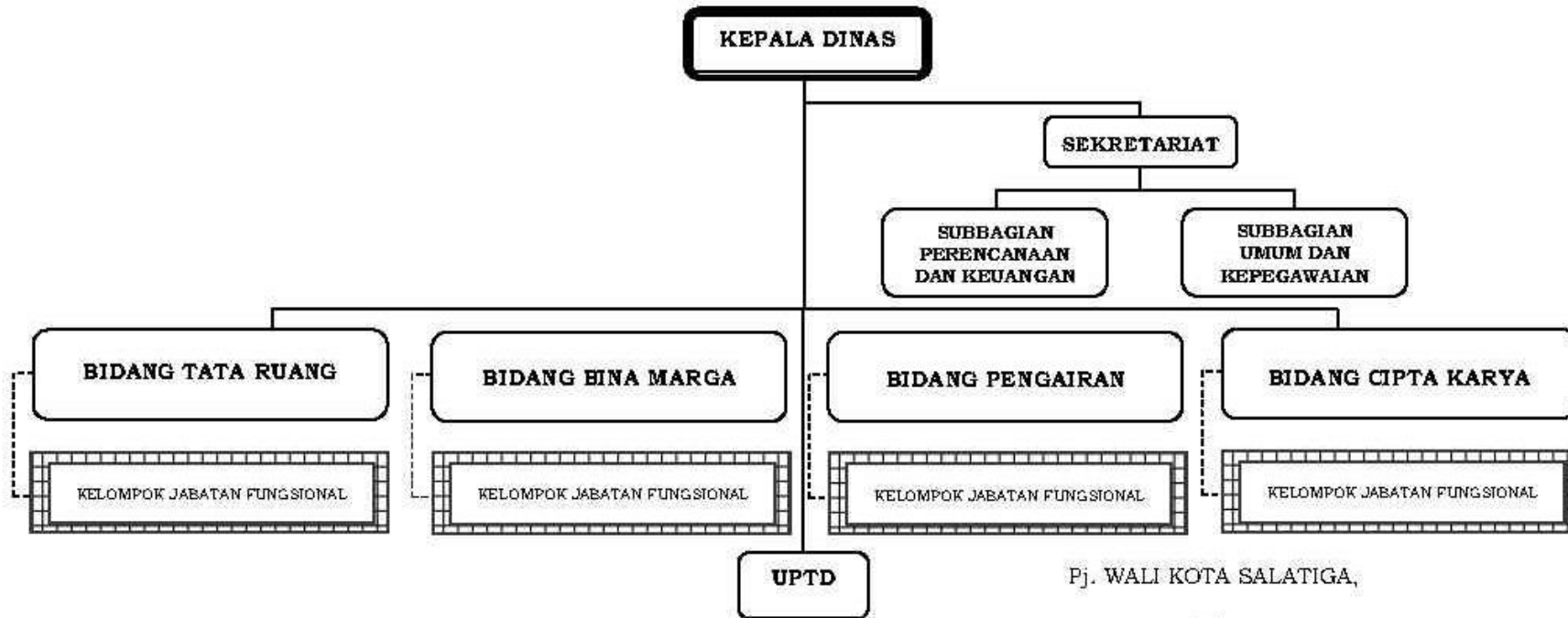
Pelaksanaan tugas oleh Kelompok Jabatan Fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang memberikan panduan dalam pelaksanaan tugas dan hubungan kerja yang jelas. Setiap Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional diatur lebih lanjut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang relevan, untuk memastikan keteraturan dan keselarasan dalam organisasi.

Pembinaan dan pengembangan Pejabat Fungsional juga dilakukan secara berkelanjutan, dengan memperhatikan peraturan yang berlaku, guna menjaga kualitas sumber daya manusia di Dinas dan memastikan mereka dapat melaksanakan tugas dengan profesional dan optimal



LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA SALATIGA
NOMOR 25 TAHUN 2024
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN
UMUM DAN PENATAAN RUANG

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



Pj. WALI KOTA SALATIGA,

ttd.

YASIP KHASANI



6.2 RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Rumusan pernyataan tujuan biasanya disusun dengan membalikkan pernyataan isu, permasalahan, dan peluang menjadi suatu kalimat positif yang ringkas. Berdasarkan dokumen **Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Salatiga Tahun 2023-2026**, tujuan yang menjadi wewenang **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Salatiga** adalah:

“Meningkatkan kualitas penataan ruang dan infrastruktur dalam mendukung pertumbuhan wilayah secara merata.”

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu empat tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah. Berdasarkan dokumen RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026, sasaran yang ingin dicapai melalui tugas dan fungsi DPUPR Kota Salatiga adalah:

- 1. Persentase wilayah dengan infrastruktur baik;**
- 2. Meningkatnya kualitas penataan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.**

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah, strategi dan kebijakan dirumuskan dalam **Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga Tahun 2023-2026** sebagai berikut:

Strategi

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran adalah:

1. Membangun, memelihara, dan meningkatkan berbagai sarana dan prasarana infrastruktur umum (fasilitas dan utilitas);
2. Meningkatkan layanan izin bangunan serta pengawasan kualitas bangunan dan lingkungannya;
3. Memfasilitasi tenaga/usaha jasa konstruksi untuk menjadi tenaga terampil, bersertifikat, dan paham aturan jasa konstruksi.



Kebijakan

Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah:

1. Mewujudkan pemulihan ekonomi kerakyatan melalui pelayanan infrastruktur, penanganan stunting, dan penanggulangan kemiskinan;
2. Mewujudkan insan yang sehat dan cerdas menuju Salatiga yang bersih, sehat, berilmu, dan berbudi luhur;
3. Mewujudkan infrastruktur daerah yang berkualitas dan produktif menuju Salatiga yang nyaman dan mandiri;
4. Mewujudkan masyarakat yang semakin sejahtera menuju Salatiga makmur.

Catatan Pembaruan Hingga 2024:

1. Kemajuan Pelaksanaan Tujuan dan Sasaran:

- Persentase wilayah dengan infrastruktur baik telah mencapai **75 persen** pada akhir tahun 2024, meningkat dari **68 persen** pada tahun 2023.
- Kualitas penataan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang terus dipantau melalui digitalisasi sistem perizinan bangunan.

2. Penguatan Strategi:

- Implementasi teknologi ramah lingkungan dalam pembangunan infrastruktur baru.
- Penambahan alokasi anggaran untuk peningkatan pelatihan tenaga jasa konstruksi menjadi tenaga bersertifikat, dengan capaian **85 persen tenaga terlatih bersertifikat** hingga akhir 2024.

3. Penyesuaian Kebijakan:

- Penekanan pada inklusi sosial dalam pembangunan infrastruktur untuk mendukung **desa inklusif**.
- Optimalisasi pengelolaan dana CSR dari sektor swasta untuk mendukung pemeliharaan fasilitas umum.



INFORMASI NON KEUANGAN LAINNYA

Pada tahun anggaran 2024, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Salatiga terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas infrastruktur dan penataan ruang kota melalui berbagai program dan kegiatan strategis. Salah satunya adalah upaya penguatan sistem informasi geospasial yang dapat mendukung pengelolaan ruang yang lebih efektif dan berbasis data. Selain kerjasama foto udara dengan Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada yang telah dilaksanakan pada 2023, DPUPR juga memanfaatkan teknologi terkini untuk pemantauan dan evaluasi pembangunan.

Di sektor infrastruktur, DPUPR Kota Salatiga berfokus pada pemeliharaan dan pengembangan fasilitas publik, seperti jalan, jembatan, dan drainase, guna mendukung mobilitas masyarakat serta mencegah potensi banjir. Selain itu, perencanaan tata ruang yang berkelanjutan terus menjadi prioritas, dengan memperhatikan keseimbangan antara pengembangan wilayah dengan konservasi lingkungan.

Pada tahun 2024, DPUPR juga melakukan berbagai upaya inovatif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan kota. Salah satunya adalah dengan mengadakan forum-forum dialog publik, yang memungkinkan masyarakat untuk memberikan masukan terhadap perencanaan pembangunan yang sedang dan akan dilaksanakan. Dengan demikian, diharapkan pembangunan yang dilakukan lebih inklusif dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.

Lebih lanjut, DPUPR akan terus memperbarui berbagai data dan informasi terkait infrastruktur dan tata ruang kota untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan program yang dijalankan tetap relevan dan responsif terhadap perkembangan dan kebutuhan masyarakat di Kota Salatiga.

Selain program kerjasama foto udara dan rencana tata ruang yang telah disahkan, DPUPR Kota Salatiga di tahun 2024 juga fokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengelolaan infrastruktur yang lebih baik. Sebagai langkah strategis, DPUPR meluncurkan beberapa program pembaruan dalam upaya menciptakan lingkungan yang lebih aman, nyaman, dan ramah bagi warganya. Salah satunya adalah implementasi sistem informasi manajemen pembangunan (SIMPEL), yang memungkinkan pemantauan dan pengawasan proyek pembangunan secara real-time, sehingga dapat meminimalkan potensi kesalahan dan meningkatkan akuntabilitas.



DPUPR juga tengah menyusun dan memperbarui peta digital yang berisi data spasial terkait infrastruktur kritis seperti jalur distribusi air bersih, jaringan listrik, dan sistem drainase kota. Pembaruan peta ini bertujuan untuk mempermudah pengelolaan aset publik dan mempercepat tanggap darurat apabila terjadi bencana atau permasalahan infrastruktur.

Dalam upaya meningkatkan ketahanan kota terhadap perubahan iklim, DPUPR juga mulai mengintegrasikan konsep pembangunan berkelanjutan dengan memperkenalkan teknologi ramah lingkungan pada proyek-proyek baru, seperti penggunaan material bangunan yang lebih efisien energi dan penerapan sistem pengelolaan air hujan yang lebih baik. Inovasi ini diharapkan dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan meningkatkan daya tahan Kota Salatiga terhadap bencana alam.

Selain itu, DPUPR Kota Salatiga aktif dalam menyusun kajian pengembangan kawasan dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Ini menjadi landasan dalam perencanaan pembangunan kota yang lebih baik dan dapat diterima oleh masyarakat.

DPUPR juga berkomitmen untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap pembangunan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Melalui berbagai program penyuluhan dan pelatihan, DPUPR mendorong masyarakat untuk lebih aktif berpartisipasi dalam menjaga dan merawat fasilitas kota yang telah dibangun.

Dengan berbagai langkah inovatif tersebut, DPUPR Kota Salatiga berupaya mewujudkan Kota Salatiga yang lebih maju, berkelanjutan, dan ramah lingkungan pada tahun 2024 dan seterusnya.



BAB VII
PENUTUP

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kota Salatiga yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kota Salatiga Tahun Anggaran 2024. Catatan atas laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Kami berharap penyampaian Catatan atas Laporan Keuangan ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) serta memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan fairness dalam pengelolaan keuangan daerah.

Salatiga, 31 Desember 2024

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KOTA SALATIGA**

Ir. SYAHDHANI ONANG PRASTOWO, S.T., M.T

NIP. 19781227 200502 1 003